



REPEH RAPIH KERTA RAHARJA

PEMERINTAH
KABUPATEN BANDUNG



**LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
(LKIP)
BAPPEDA
TAHUN 2021**



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

BAPPEDA

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
Jl. RAYA SOREANG Km. 17 TELP. (022) 5891159 SOREANG 40911
Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat, E-mail : bapkabbdg@yahoo.com
[Website BAPPEDA.bandungkab.go.id](http://Website.BAPPEDA.bandungkab.go.id)

KEPUTUSAN KEPALA BAPPEDA KABUPATEN BANDUNG

NOMOR : 050/ -Sekret/2022
LAMPIRAN : 1 (satu)

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) BAPPEDA TAHUN 2021

KABUPATEN BANDUNG

KEPALA BAPPEDA KABUPATEN BANDUNG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyusunan LKIP BAPPEDA Tahun 2021, serta efektifitas dalam pekerjaan perlu membentuk Tim Penyusun agar dalam proses pelaksanaannya lebih terarah, terukur dan tepat waktu sesuai dengan jadwal yang ditetapkan;
- b. bahwa dalam mencapai maksud tersebut pada huruf a diatas, perlu membentuk Tim Penyusun LKIP BAPPEDA Tahun 2021 yang ditetapkan dengan surat keputusan kepala BAPPEDA.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 8 Tahun 2021 tentang tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
10. Peraturan Bupati Bandung Nomor 100 Tahun 2019 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
11. Peraturan Bupati Bandung Nomor 60 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 99 Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2021.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
PERTAMA :
KEDUA :
KETIGA :
KEEMPAT :
KELIMA :
- :
: Membentuk Tim Penyusun LKIP BAPPEDA Tahun 2021 sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini;
: Tim penyusun sebagaimana dimaksud pada diktum pertama, melaksanakan tugas untuk menyusun LKIP BAPPEDA Tahun 2021 sebagaimana rincian tugas terlampir;
: Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan ini dibebankan pada anggaran BAPPEDA Tahun Anggaran 2021;
: Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;
: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Soreang
Pada tanggal : Januari 2022

BAPPELITBANGDA KABUPATEN BANDUNG

Kepala,



DR. Ir. ERWIN RINALDI, M.Sc

Pemhina Utama Muda

NIP. 19671110 199303 1 012

Tembusan :

1. Yth. Bupati Bandung, sebagai laporan.
2. Yth. Wakil Bupati Bandung, sebagai laporan.
3. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung, sebagai laporan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA BAPPEDA KABUPATEN BANDUNG
NOMOR : 050/ -Sekret/2022
TANGGAL : Januari 2022
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LKIP BAPPEDA
KABUPATEN BANDUNG

**SUSUNAN TIM PENYUSUN LKIP BAPPEDA TAHUN 2021
KABUPATEN BANDUNG**

Jabatan dalam Tim

Nama/Jabatan

Pengarah : Kepala BAPPEDA Kabupaten Bandung

Tim Pelaksana
Ketua : Sekretaris BAPPEDA Kabupaten Bandung
Anggota : 1. Asep Sukandar, ST, M. Si
2. Reni Rostika, SE, MM
3. Daeng Yanuar Ary H, SE
4. Tenaga Harian Lepas (THL) Bidang Sekretariat

Tim Penyusun
Koordinator Tim : Wahyudin, ST, ME
Anggota : 1. Ai Kania, SP, ME
2. Primayanti Sri Astuti, SH
3. Yana Barlian, SH., MM
4. Yanti Megayanti, S. Sos., M. Si
5. Ajat Sudrajat, S.Pt, M.P.W.K
6. Martius, S. Sos
7. Nadea Kharisma Fauziah, S. Pd

BAPPEDA KABUPATEN BANDUNG
Kepala,



DR. Ir. ERWIN RINALDI, M.Sc
Pembina Utama Muda
NIP. 19671110 199303 1 012

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KEPALA BAPPELITBANGDA KABUPATEN BANDUNG
NOMOR : 050/ -Sekret/2022
TANGGAL : Januari 2022
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LKIP BAPPEDA
KABUPATEN BANDUNG

RINCIAN TUGAS TIM PENYUSUN LKIP BAPPEDA TAHUN 2021
KABUPATEN BANDUNG

1. Pengarah

- Merumuskan arah kebijakan dalam penyusunan LKIP BAPPEDA Tahun 2021;
- Memimpin rapat pimpinan dalam dalam penyusunan LKIP BAPPEDA Tahun 2021;
- Melaporkan hasil pekerjaan tim penyusun LKIP BAPPEDA Tahun 2021 kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung.

2. Tim Pelaksana

a. Ketua

- Mengkoordinasikan arah kebijakan dalam penyusunan LKIP BAPPEDA Tahun 2021
- Memberikan arahan teknis dalam penyusunan LKIP BAPPEDA Tahun 2021;
- Memimpin/mewakili rapat koordinasi dalam dalam penyusunan LKIP BAPPEDA Tahun 2021;
- Melaporkan hasil pekerjaan penyusunan LKIP BAPPEDA Tahun 2021 kepada Ketua Tim Pengarah.
- Menyiapkan draft konsep kebijakan teknis dalam penyusunan LKIP BAPPEDA Tahun 2021;
- Memimpin rapat tim pelaksana dan tim penyusunan LKIP BAPPEDA Tahun 2021;
- Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasi hasil pekerjaan tim penyusun LKIP BAPPEDA Tahun 2021;
- Mengkoordinasikan pelaksanaan administrasi perkantoran (administrasi surat menyurat beserta pendistribusian, penyediaan peralatan serta sarana dan prasarana) selama penyusunan Laporan Tahunan (LAPTAH) BAPPEDA Tahun 2021;
- Melaporkan hasil pekerjaan pada tim pengarah.

b. Anggota

- Melaksanakan fasilitasi penyusunan LKIP BAPPEDA Tahun 2021;
- Membantu koordinator dalam pengadministrasian tim penyusun LKIP BAPPEDA Tahun 2021;
- Menyampaikan laporan hasil pekerjaan kepada ketua tim pelaksana

3. Tim Penyusun

a. Koordinator Tim

- Mengkoordinasikan pelaksanaan teknis penyusunan LKIP BAPPEDA Tahun 2021;
- Memimpin rapat pembahasan substansi penyusunan LKIP BAPPEDA Tahun 2021;
- Mengkoordinasikan dan mengsynchronisasikan data-data pendukung penyusunan LKIP BAPPEDA Tahun 2021;
- Mengkoordinasikan pekerjaan yang dilaksanakan oleh tim penyusun LKIP BAPPEDA Tahun 2021;
- Ikut melaksanakan penyusunan LKIP BAPPEDA Tahun 2021;
- Menelaah dan mengoreksi hasil pekerjaan anggota;
- Menyusun draft LKIP bahan ekspose kepada Ketua Tim Pengarah;

- **Menyampaikan laporan hasil pekerjaan tim penyusun kepada Sekretaris dan Ketua Tim Pengarah.**

b. Anggota

- **Melakukan rekapitulasi data program/kegiatan BAPPEDA Tahun 2021;**
- **Menyiapkan dan menyusun data capaian indikator kinerja utama (IKU) BAPPEDA Tahun 2021;**
- **Mengolah data capaian kinerja masing-masing IKU BAPPEDA Tahun 2021 sesuai program/kegiatan/subkegiatan pendukung;**
- **Menganalisis capaian kinerja IKU BAPPEDA Tahun 2021 dibandingkan dengan target;**
- **Menyampaikan hasil pekerjaan penyusunan LKIP BAPPEDA Tahun 2021 kepada koordinator tim.**

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja BAPPEDA Kabupaten Bandung Tahun 2021 merupakan wujud pertanggungjawaban terhadap kinerja yang telah dicapai oleh BAPPEDA Kabupaten Bandung selama Tahun 2021. Dengan laporan ini, kinerja BAPPEDA Kabupaten Bandung dapat tergambar dan terukur, sehingga hal tersebut dapat dijadikan sebagai sumber referensi untuk pengambilan keputusan mengenai berbagai langkah strategis dimasa yang akan datang sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya sebagai perangkat daerah, yang dalam hal ini untuk lebih memperkuat dan meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan terutama dalam mewujudkan konsistensi perencanaan pembangunan dan penganggaran.

Diharapkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) BAPPEDA Kabupaten Bandung Tahun 2021 ini dapat memberikan informasi yang diharapkan oleh seluruh pemangku kepentingan mengenai pencapaian kinerja BAPPEDA Kabupaten Bandung dalam periode Tahun 2021. Semoga di tahun mendatang capaian kinerja ini dapat semakin ditingkatkan dan sesuai target yang ditetapkan, sehingga BAPPEDA Kabupaten Bandung dapat memberikan kontribusi yang lebih baik bagi pembangunan daerah di Kabupaten Bandung.

Masukan dan saran yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan sebagai bahan penyempurnaan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada waktu yang akan datang. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini.

Soreang, Februari 2022

**KEPALA BAPPELITBANGDA
KABUPATEN BANDUNG,**



DR. Ir. ERWIN RINALDI, M.Sc

Pembina Utama Muda

NIP. 19671110 199303 1 012

RINGKASAN EKSEKUTIF

Pada Tahun Anggaran 2021, BAPPEDA Kabupaten Bandung dialokasikan anggaran Belanja sebesar Rp. 23.314.528.913,16 yang terbagi ke dalam Belanja Operasional sebesar Rp. 21.930.546.733,16 yang dijabarkan ke dalam 4 Program, 16 Kegiatan 58 subkegiatan serta Belanja Modal sebesar Rp. 1.352.072.880 yang dijabarkan ke dalam belanja modal peralatan mesin, gedung dan bangunan serta modal aset tetap lainnya..

Pada dasarnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan laporan yang memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja BAPPEDA Kabupaten Bandung selama Tahun 2021. Capaian kinerja Tahun 2021 tersebut dibandingkan dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2021 sebagai tolak ukur keberhasilan tahunan organisasi.

BAPPEDA Kabupaten Bandung sebagai lembaga teknis daerah Pemerintah Kabupaten Bandung, dalam keberhasilan pencapaian tujuan dan sasarnya sangat dipengaruhi oleh tingkat partisipasi dari seluruh pelaku pembangunan (*stakeholders*) dan para pelaksana kebijakan, sehingga BAPPEDA Kabupaten Bandung dituntut untuk mampu memecahkan berbagai permasalahan dan tantangan di Kabupaten Bandung, dalam melayani/memenuhi kebutuhan masyarakat serta memajukan daerah melalui peningkatan kinerjanya.

Dalam melaksanakan Rencana Strategis BAPPEDA Kabupaten Bandung Tahun 2016-2021, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2021 yang merupakan bagian dari informasi pengukuran kinerja pelaksanaan berbagai program dan kegiatan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai melalui sasaran strategis dan indikatornya, dengan rincian sebagai berikut:

- Sasaran Meningkatnya Kualitas Produk Perencanaan Pembangunan Daerah) dengan 2 indikator kinerja yaitu Persentase kesesuaian program pada dokumen perencanaan terhadap dokumen penganggaran dan Persentase ketepatan waktu dalam penyusunan dokumen perencanaan ;
- Sasaran Meningkatnya peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan) dengan indikator kinerja yaitu Persentase usulan Musrenbang tingkat Kecamatan dalam RKPD;
- Sasaran Meningkatnya efektifitas tata kelola perangkat daerah BAPPEDA dengan 2 indikator kinerja yaitu Nilai Akuntabilitas Kinerja BAPPEDA dan Persentase aset dalam kondisi baik.

Pertama, sasaran strategis BAPPEDA Kabupaten Bandung yaitu meningkatnya kualitas produk perencanaan pembangunan daerah, dengan capaian indikator kinerja adalah sebagai berikut : (1). Persentase kesesuaian program pada dokumen perencanaan terhadap

dokumen penganggaran sebesar 100%; (2). Persentase ketepatan waktu dalam penyusunan dokumen perencanaan sebesar 100%.

Kedua, sasaran strategis meningkatnya peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan dengan capaian indikator kinerja: (1). Persentase usulan Musrenbang tingkat kecamatan dalam RKPD sebesar 99,97%.

Ketiga, sasaran strategis meningkatnya efektifitas tata kelola perangkat daerah BAPPEDA dengan capaian indikator kinerja: (1). Nilai akuntabilitas kinerja BAPPEDA sebesar 83(A); (2) Persentase aset dalam kondisi baik sebesar 96,30%.

Berdasarkan hasil evaluasi dan analisis terhadap 3 (tiga) sasaran strategis dan 5 (lima) indikator, pencapaian sasaran kinerja BAPPEDA Kabupaten Bandung menunjukkan hasil yang memuaskan dengan nilai rata-rata sebesar 100,39% dan realisasi anggaran sebesar 90,22%.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah memiliki kewajiban meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang berdayaguna, berhasilguna, bersih dan bertanggung jawab dalam mewujudkan aspirasi masyarakat serta mencapai tujuan dan cita-cita berbangsa dan bernegara melalui pemantapan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai visi dan misi serta tujuan instansi pemerintah, serta dalam rangka perwujudan *good governance* yang merupakan prasyarat bagi setiap pemerintah.

Akuntabilitas merupakan kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif suatu organisasi. Sedangkan kinerja merupakan tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi.

Atas dasar hal tersebut, untuk mempertanggungjawabkan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan di bidang perencanaan pembangunan, maka BAPPEDA Kabupaten Bandung menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Adapun informasi yang diharapkan dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), yaitu guna mendorong instansi pemerintah untuk menyelenggarakan tugas umum pemerintah dan pembangunan sehingga beroperasi secara efisien, efektif dan responsive terhadap masyarakat, sehingga menjadi masukan dan umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan serta dapat menjagaterpeliharanya kepercayaan masyarakat.

Pelaksanaan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) BAPPEDA Kabupaten Bandung Tahun 2021 dengan memperhatikan kepada peraturan perundang-undangan yang melandasi pelaksanaan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), yaitu :

1. TAP MPR No.XI/MPR/1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;

4. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2013 tentang Perubahan Lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan;
14. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bandung Tahun 2016 – 2021;
15. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

16. Peraturan Bupati Bandung Nomor 77 Tahun 2019 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Badan Daerah;
17. Peraturan Bupati Bandung Nomor 100 Tahun 2019 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
18. Peraturan Bupati Bandung Nomor 112 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Perubahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Tahun 2021.
19. Peraturan Bupati Bandung Nomor 147 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026;

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2021 berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen perencanaan. Pencapaian sasaran tersebut disajikan berupa informasi mengenai pencapaian sasaran Renstra, realisasi pencapaian indikator sasaran disertai dengan penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja dan perbandingan capaian indikator kinerja, dengan demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) BAPPEDA Kabupaten Bandung yang menjadi laporan kemajuan penyelenggaraan instansi pemerintah oleh Kepala BAPPEDA Kabupaten Bandung kepada Bupati Bandung ini telah disusun dan dikembangkan sesuai Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Bandung Nomor 77 Tahun 2019 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Badan Daerah, Peraturan Bupati Bandung Nomor 100 Tahun 2019 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah serta Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Keuangan Daerah. Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 97 Tahun 2021 tanggal 15 November 2021 mengenai Bagan Struktur dan Organisasi Daerah dan Peraturan Bupati Nomor 126 Tahun 2021 tentang Pedoman Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Bappelitbangda Kabupaten Bandung maka untuk selanjutnya BAPPEDA disebut BAPPELITBANGDA.

1.2 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) BAPPEDA Kabupaten Bandung Tahun 2021 adalah dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) BAPPEDA Kabupaten Bandung Tahun 2021 adalah untuk mempertanggungjawabkan kinerja dengan menyajikan informasi mengenai tingkat keberhasilan / kegagalan pelaksanaan tujuan dan

sasaran BAPPEDA Kabupaten Bandung dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Bandung.

1.3 Tugas Pokok dan Fungsi

BAPPEDA Kabupaten Bandung dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang mempunyai tugas pokok : memimpin, mengatur, merumuskan, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan dan mempertanggungjawabkan kebijakan dan pelaksanaan unsur penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan daerah. Dalam melaksanakan tugas pokoknya Kepala Badan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi perencanaan, penelitian dan pengembangan daerah; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Kepala Badan mempunyai sub tugas sebagai berikut:

- a. menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis Badan yang meliputi Kesekretariatan, Bidang Perencanaan Pembangunan Fisik, Bidang Perencanaan Pembangunan Sumber Daya Alam dan Investasi, Bidang Perencanaan Pembangunan Sosial dan Pemerintahan, Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, dan Bidang Penelitian dan Pengembangan, serta Kelompok Jabatan Fungsional berdasarkan visi dan misi Daerah serta tugas pokok dan fungsi Badan;
- b. menyelenggarakan perumusan perencanaan, penelitian dan pengembangan yang meliputi Bidang Perencanaan Pembangunan Fisik, Bidang Perencanaan Pembangunan Sumber Daya Alam dan Investasi, Bidang Perencanaan Pembangunan Sosial dan Pemerintahan, Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, dan Bidang Penelitian dan Pengembangan;
- c. menyelenggarakan dan mengkoordinasikan penyusunan dan penetapan Rencana Strategis(Renstra), Laporan Kinerja Instansi Pemerintah(LKIP), Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kerja Tahunan (RKT),

- Perjanjian Kinerja, Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan (SP) Badan serta mengkoordinasikan kebutuhan data dan informasi bagi penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dan laporan pertanggungjawaban akhir masa jabatan Bupati, Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) serta dokumen- dokumen kinerja Badan lainnya;
- d. menyelenggarakan perumusan dan menetapkan kebijakan teknis perencanaan, penelitian dan pengembangan yang meliputi Bidang Perencanaan Pembangunan Fisik, Bidang Perencanaan Pembangunan Sumber Daya Alam dan Investasi, Bidang Perencanaan Pembangunan Sosial dan Pemerintahan, Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, dan Bidang Penelitian dan Pengembangan yang diharmonisasikan dan disinergikan dengan perencanaan nasional dan provinsi berdasarkan visi dan misi Daerah;
 - e. menyelenggarakan pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan perencanaan, penelitian dan pengembangan, serta informasi pembangunan daerah;
 - f. menyelenggarakan pembentukan dan pengembangan kelembagaan Kesekretariatan, Bidang Perencanaan Pembangunan Fisik, Bidang Perencanaan Pembangunan Sumber Daya Alam dan Investasi, Bidang Perencanaan Pembangunan Sosial dan Pemerintahan, Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, dan Bidang Penelitian dan Pengembangan, serta Kelompok Jabatan Fungsional berdasarkan kebijakan pedoman, norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan pemerintah;
 - g. menyelenggarakan kebijakan pemerintah dan provinsi serta kebijakan umum daerah dalam rangka perencanaan, penelitian dan pengembangan daerah;
 - h. memimpin, mengatur, membina, mengevaluasi, mengendalikan dan mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan teknis serta tugas Badan;
 - i. menyelenggarakan penetapan program dan kegiatan Badan lingkup Kesekretariatan, Bidang Perencanaan Pembangunan Fisik, Bidang Perencanaan Pembangunan Sumber Daya Alam dan Investasi, Bidang Perencanaan Pembangunan Sosial dan Pemerintahan, Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, dan Bidang Penelitian dan Pengembangan;
 - j. menyelenggarakan perancangan dan pengembangan sistem informasi dan dokumentasi teknis pelaksanaan program pembangunan bidang Kesekretariatan, Bidang Perencanaan Pembangunan Fisik, Bidang

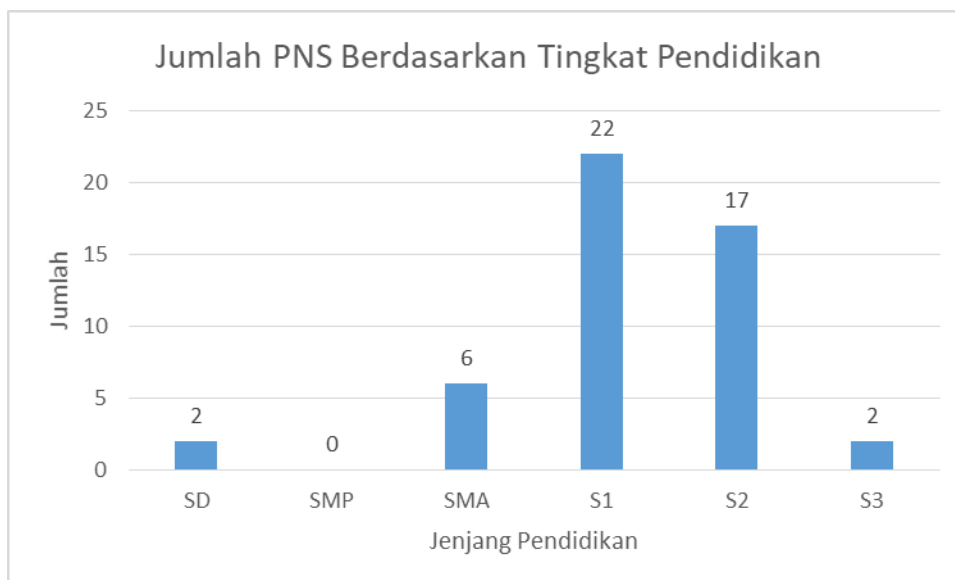
Perencanaan Pembangunan Sumber Daya Alam dan Investasi, Bidang Perencanaan Pembangunan Sosial dan Pemerintahan, Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, dan Bidang Penelitian dan Pengembangan;

- k. menyelenggarakan konsultasi tugas dengan pihak- pihak yang terkait baik teknis maupun administratif, untuk keserasian dan keharmonisan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan;
- l. mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan tugas Bidang berdasarkan program kerja Badan;
- m. membina pegawai sesuai ketentuan kepegawaian untuk peningkatan kualitas dan karier pegawai;
- n. memeriksa konsep-konsep surat yang diajukan oleh Bidang sebelum ditandatangani;
- o. mengevaluasi pelaksanaan tugas Bidang melalui penilaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP) untuk mengetahui prestasi kerjanya dan sebagai bahan pembinaan serta upaya tindak lanjut;

1.4 Sumber Daya Aparatur

Berkaitan dengan tugas dan fungsinya, sumber daya manusia (Human Resources) BAPPEDA Kabupaten Bandung merupakan akumulasi dari berbagai jenis tingkatan pendidikan yang terdiri dari berbagai disiplin ilmu, pangkat/golongan serta masa kerja dalam rangka menunjang peningkatan kinerja serta optimalisasi target kinerja berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Perubahan BAPPEDA Kabupaten Bandung Tahun 2016-2021.

Untuk mengetahui jumlah pegawai berdasarkan tingkat pendidikan, dapat dilihat dalam grafik berikut ini:



Grafik.1.1 Jumlah Pegawai Bappeda berdasarkan Tingkat Pendidikan

Berdasarkan grafik diatas, untuk klasifikasi tingkat pendidikan Strata 3 (S3) berjumlah 1 orang atau proporsinya sebesar 4.08 persen dari agregat jumlah pegawai. Strata 2 (S2) berjumlah 17 orang atau proporsinya sebesar 34.69 persen, Strata 1 (S1) berjumlah 22 orang dengan proporsi sebesar 44.89 persen, SMA berjumlah 6 orang dengan proporsi 12.24 persen, SMP berjumlah 0 orang dan SD berjumlah 2 orang dengan proporsi 4.08 persen.

1.5 Permasalahan Utama/Isu Strategis

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis dapat meningkatkan pencapaian prioritas pembangunan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Tugas dan fungsi BAPPEDA Kabupaten Bandung dalam memberikan pelayanan, senantiasa mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan internal maupun eksternal, dan aspiratif bagi pengguna layanan. Oleh karena itu, perhatian kepada mandat dari masyarakat dan lingkungannya merupakan bagian dari perencanaan yang tidak boleh diabaikan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, dapat kita identifikasi dari permasalahan-permasalahan yang terjadi yaitu:

1. Belum optimalnya kualitas SDM, yang sesuai standar kebutuhan suatu unit kerja.
2. Masih adanya penempatan SDM di masing-masing bidang yang belum sesuai dengan kompetensi dan kualifikasi pendidikan dan keahlian.

3. Toleransi terhadap resiko pekerjaan masih rendah, sehingga kondisi ini mengancam sifat inovasi pada para karyawan yang ada.
4. Konsistensi antara perencanaan dan penganggaran masih belum optimal.
5. Penelitian yang dilakukan belum sepenuhnya berkaitan langsung dengan bahan kebijakan perencanaan dan publikasi hasil penelitian belum sepenuhnya ditindaklanjuti.
6. Sharing data dan informasi belum berjalan dengan baik, karena pemanfaatan sistem informasi yang telah tersedia belum optimal.
7. Hasil pengendalian dan evaluasi, serta penggunaan dan tindak lanjut terhadap hasil evaluasi dan pengendalian belum sepenuhnya dijadikan sebagai input bagi kebutuhan perencanaan.

Suatu kondisi/kejadian yang menjadi permasalahan, apabila tidak diantisipasi dengan faktor kekuatan yang ada, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar dan apabila tidak ada tindakan yang dilakukan maka akan menimbulkan ancaman dan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

1.6 Sistematika Penyusunan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) BAPPEDA Kabupaten Bandung Tahun 2021 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini menjelaskan latar belakang yang berisikan gambaran umum, maksud dan tujuan, tugas pokok dan fungsi, permasalahan utama yang sedang dihadapi organisasi, dan sistematika penulisan.

BAB II : PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini menjelaskan tentang beberapa hal penting dalam perencanaan dan penetapan kinerja serta target anggaran sesuai perjanjian kinerja BAPPEDA Kabupaten Bandung Tahun 2021.

BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA

Pada bab ini menjelaskan tentang pencapaian sasaran kinerja strategis sesuai hasil pengukuran kinerja organisasi, dan realisasi anggaran.

BAB IV : PENUTUP

Pada bab ini menjelaskan kesimpulan atas capaian kinerja organisasi serta langkah dimasa mendatang yang akan dilakukan organisasi, untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Rencana Strategis (Renstra) Perubahan BAPPEDA Kabupaten Bandung Tahun 2016-2021 merupakan dokumen perencanaan strategis yang disusun dan dirumuskan setiap lima tahun (perencanaan jangka menengah) sebagai konsekuensi dari adanya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Perubahan Kabupaten Bandung Tahun 2016-2021. Rencana Strategis (Renstra) secara sistematis mengedepankan isu-isu lokal, yang diterjemahkan kedalam bentuk strategi kebijakan dan rencana yang terarah, efektif dan berkesinambungan sehingga dapat diimplementasikan secara bertahap sesuai dengan skala prioritas dan kemampuan anggaran pembiayaan.

Perencanaan Kinerja merupakan proses penetapan kegiatan tahunan disertai indikator kinerja dan tingkat capaiannya berdasarkan program, kebijakan, dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis. Penyusunan Rencana Kinerja dilaksanakan seiring dengan agenda penyusunan dari kebijakan anggaran serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu.

Dokumen Rencana Kinerja memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, Indikator Kinerja Sasaran, dan Rencana Capaiannya. Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian sasaran yang telah ditetapkan. Penetapan Indikator Kinerja harus didasarkan pada perkiraan yang realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati Bandung Nomor 48 tahun 2018 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Tahun 2019.

Tujuan BAPPEDA Kabupaten Bandung adalah sebagai berikut:

- 1. Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah*
- 2. Meningkatnya kapasitas dan kapabilitas internal BAPPEDA*

Sasaran BAPPEDA Kabupaten Bandung adalah sebagai berikut:

- 1. Meningkatnya kualitas produk perencanaan pembangunan daerah*
- 2. Meningkatnya peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan*
- 3. Meningkatnya efektifitas tata kelola Perangkat Daerah BAPPEDA*

BAPPEDA Kabupaten Bandung telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut:

Tabel 2.1
Indikator Kinerja Utama Bappeda Kabupaten Bandung

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya kualitas produk perencanaan pembangunan daerah	Persentase kesesuaian program pada dokumen perencanaan terhadap dokumen penganggaran	1. RKPD 2. APBD
		Persentase ketepatan waktu dalam penyusunan dokumen perencanaan	1. RPJPD 2. RPJMD 3. RKPD
2	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan	Persentase usulan Musrenbang Tingkat Kecamatan dalam RKPD	DSP Kecamatan yang ditetapkan dalam RKPD

2.1 Perjanjian Kinerja Tahun 2021

Pada tahun 2021, BAPPEDA Kabupaten Bandung telah menetapkan target sasaran kinerja sebagaimana tercantum dalam formulir Penetapan Kinerja BAPPEDA Kabupaten Bandung Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target
1	Meningkatnya kualitas produk perencanaan pembangunan daerah	Persentase kesesuaian program pada dokumen perencanaan terhadap dokumen penganggaran	97%
		Persentase ketepatan waktu dalam penyusunan dokumen perencanaan	100%
2	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan	Persentase usulan Musrenbang Tingkat Kecamatan dalam RKPD	96,5%
3	Meningkatnya efektifitas	Nilai Akuntabilitas Kinerja BAPPEDA	81 (A)

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target
	tata kelola perangkat daerah BAPPEDA	Persentase aset dalam kondisi baik	94,5%

2.2 Target Anggaran

Organisasi Perangkat Daerah : BAPPEDA Kabupaten Bandung

Tahun Anggaran : 2021

Indikator Kinerja	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target
Nilai Akuntabilitas Kinerja BAPPEDA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Operasional Administrasi Perkantoran	16.591.590.290
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	- Persentase ketersediaan dokumen sesuai dengan pedoman yang berlaku - Persentase pemenuhan proses perencanaan - Persentase ketercapaian kinerja hasil perencanaan	426.245.204
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renstra dan Renja yang diselesaikan tepat waktu	246.000.000
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD	5.000.000
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD	5.000.000
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD	5.000.000
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan DPA-SKPD	5.000.000
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen LKIP PD yang diselesaikan secara tepat waktu	67.149.904

Indikator Kinerja	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	- Jumlah dokumen laporan tahunan yang diselesaikan secara tepat waktu - Jumlah dokumen laporan triwulanan yang diselesaikan secara tepat waktu - Jumlah dokumen evaluasi renstra dan renja yang diselesaikan secara tepat waktu	93.095.300
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	- Persentase ketersediaan dokumen anggaran/keuangan yang diselesaikan tepat waktu - Persentase laporan pertanggungjawaban keuangan sesuai ketentuan - Persentase ketersediaan dokumen kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu	12.583.980.363
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pembayaran Gaji ASN	12.454.780.363
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	- Jumlah laporan realisasi anggaran yang diselesaikan secara tepat waktu - Jumlah dokumen CALK	48.000.000
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan rekonsiliasi keuangan bulanan/triwulanan/semesteran yang diselesaikan secara tepat waktu	31.200.000
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah laporan prognosis realisasi anggaran yang diselesaikan secara tepat waktu	50.000.000
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tercapainya Persentase rata-rata capaian SKP ASN diatas >=80%	184.852.097
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang dibutuhkan	110.750.000
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah pegawai yang mengikuti bimbingan teknis peraturan perundang-	74.102.097

Indikator Kinerja	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target
		undangan	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<ul style="list-style-type: none"> - Tercapainya Persentase ketersediaan dokumen anggaran/keuangan yang diselesaikan tepat waktu - Persentase laporan pertanggungjawaban keuangan sesuai ketentuan - Persentase ketersediaan dokumen kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu - Tercapainya Persentase ketersediaan operasional perkantoran - Persentase pemenuhan gedung kantor yang layak pakai 	1.212.767.668
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah penerimaan surat masuk dan pembuatan surat keluar	27.000.000
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan pembayaran jasa layanan komunikasi, air dan listrik	110.247.668
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan pembayaran jasa pelayanan umum (meliputi penyediaan jasa kebersihan, Tenaga Keamanan dan Tenaga Harian Lepas (THL))	1.075.520.000
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<ul style="list-style-type: none"> -Tercapainya Persentase ketersediaan operasional perkantoran -Persentase pemenuhan gedung kantor yang layak pakai 	1.242.644.958
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah satuan bahan logistik kantor yang dibeli	20.000.000
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah satuan barang yang dicetak dan digandakan	37.057.458
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan yang dibeli	38.000.000

Indikator Kinerja	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang dibeli	935.000.000
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah jenis peralatan rumah tangga yang dibeli	60.000.000
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan yang dibeli	10.945.000
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah orang yang mendapatkan makanan dan minuman	51.142.500
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah orang yang melaksanakan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	90.500.000
Persentase aset dalam kondisi baik	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan dokumen barang milik daerah	60.000.000
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah pengadaan mobil jabatan	-
	Pengadaan Mebel	Jumlah pengadaan mebel	60.000.000
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan aset kantor yang layak pakai	881.100.000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	389.750.000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan yang dipelihara	201.350.000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor	290.000.000
Persentase ketepatan waktu dalam penyusunan dokumen perencanaan	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	1. Persentase kesesuaian program pada dokumen perencanaan dengan dokumen penganggaran 2. Persentase dokumen perencanaan yang tepat waktu 3. Persentase usulan	2.977.839.623

Indikator Kinerja	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target
		Musrenbang Tingkat Kecamatan dalam RKPD	
Meningkatnya peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan daerah	1.775.525.630
	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen Ranwal RKPD dan Dokumen Rancangan Awal RPJMD)	177.792.750
	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	1. Jumlah Dokumen Usulan DAK 2. Jumlah Dokumen Usulan Bantuan Keuangan Gubernur 3. Jumlah Dokumen Perda SPPD	73.411.200
	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah pelaksanaan Konsultasi Publik RPJMD dan RKPD	119.496.000
	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Jumlah pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	60.650.050
	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	1. Jumlah penyelenggaraan Musrenbang RKPD 2. Jumlah penyelenggaraan Musrenbang RPJMD	478.329.000
	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (Dokumen RKPD, Dokumen RKPD Perubahan , Dokumen RPJMD)	865.846.630
	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase ketersediaan dokumen data dan informasi perencanaan pembangunan	793.359.493
	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	- Jumlah Dokumen Analisa Pembangunan - Jumlah Dokumen E-Database SIPD Kabupaten bandung	225.497.000
	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan	- Jumlah Dokumen Prosiding Satu Data Kabupaten Bandung (SDKB)	328.757.300

Indikator Kinerja	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target
	SKPD	- Jumlah Updating Aplikasi Perencanaan	
	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	- Jumlah Dokumen Profil Pelaksanaan kegiatan dan sub kegiatan kewilayahan - Jumlah Video dan Buku Saku Profil Data Perencanaan Pembangunan - Jumlah dokumen Prosiding Pendampingan Aplikasi SIPD	239.105.193
	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Perangkat Daerah yang memiliki Realisasi Kinerja Baik dan Sangat Baik	408.954.500
	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Monitoring Program dan Kegiatan Perangkat Daerah	242.436.000
	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	1. Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Laporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah 2. Jumlah dokumen pelaporan capaian pembangunan	166.518.500
Persentase kesesuaian program pada dokumen perencanaan dengan dokumen penganggaran	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	1. Persentase kesesuaian program pada dokumen perencanaan dengan dokumen penganggaran 2. Persentase ketercapaian indikator kinerja program	2.763.558.000
	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	1. Persentase kesesuaian program yang direncanakan terhadap program yang dianggarkan lingkup bidang pemerintahan dan pembangunan manusia 2. Persentase ketercapaian indikator kinerja program lingkup bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	811.500.000

Indikator Kinerja	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah dokumen koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Pemerintahan	109.326.000
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah dokumen pelaporan hasil asistensi Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Pemerintahan	108.500.000
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah dokumen monev Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Pemerintahan	77.500.000
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah dokumen koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Pembangunan Manusia	261.674.000
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah dokumen pelaporan hasil asistensi Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Pembangunan Manusia	132.000.000
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah dokumen monev Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Pembangunan Manusia	122.500.000
	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	1. Persentase kesesuaian program yang direncanakan terhadap program yang dianggarkan lingkup bidang perekonomian dan SDA 2. Persentase ketercapaian indikator kinerja program lingkup bidang perekonomian dan SDA	910.000.000
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD	Jumlah dokumen koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Perekonomian	218.000.000

Indikator Kinerja	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target
	dan RKPD)		
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah dokumen pelaporan hasil asistensi Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Perekonomian	310.000.000
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah dokumen pelaporan hasil sinergitas perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) bidang perekonomian	382.000.000
	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	1. Persentase kesesuaian program yang direncanakan terhadap program yang dianggarkan lingkup bidang infrastruktur dan kewilayahan 2. Persentase ketercapaian indikator kinerja program lingkup bidang infrastruktur dan kewilayahan	1.042.058.000
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah dokumen koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Infrastruktur	389.100.000
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah dokumen pelaporan hasil asistensi Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Infrastruktur	94.858.000
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah dokumen monev Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Infrastruktur	151.430.000
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah dokumen koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Kewilayahan	172.100.000

Indikator Kinerja	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah dokumen pelaporan hasil asistensi Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Kewilayahan	119.000.000
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah dokumen monev Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Kewilayahan	115.570.000
	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase pemanfaatan data dan informasi hasil kajian/penelitian untuk penunjang perencanaan	981.541.000
	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Jumlah dokumen hasil penelitian dan pengembangan bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan	303.100.000
	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah dokumen pengelolaan data kelitbangan dan peraturan	303.100.000
	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Jumlah Dokumen hasil Penelitian dan Pengembangan bidang ekonomi dan pembangunan	365.441.000
	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Jumlah dokumen hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	281.305.500
	Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika	Jumlah dokumen hasil Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika	84.135.500
	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Jumlah dokumen pengembangan inovasi dan teknologi	313.000.000
	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah dokumen inovasi daerah	313.000.000
Jumlah			23.314.528.913

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Perubahan BAPPEDA Tahun 2016-2021 maupun Rencana Kerja (Renja) Perubahan Tahun 2021. Berdasarkan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam formulir Penetapan Kinerja BAPPEDA Kabupaten Bandung Tahun 2021.

Pengukuran kinerja kegiatan di BAPPEDA Kabupaten Bandung telah menggunakan indikator kuantitatif, hal ini dilakukan supaya lebih terukur dan mudah dievaluasi. Penetapan indikator yang digunakan dalam setiap kegiatan disesuaikan dengan sifat kegiatan masing-masing, sehingga kegiatan-kegiatan tersebut dapat diukur pencapaiannya.

Pada tahun anggaran 2021, BAPPEDA Kabupaten Bandung telah menetapkan 3 (tiga) sasaran strategis yang diukur dengan 5 (Lima) indikator kinerja yang ditunjang melalui program-program strategis BAPPEDA Kabupaten Bandung.

3.1 Capaian Kinerja Bappeda Kabupaten Bandung Tahun 2021

Pengukuran tingkat capaian kinerja BAPPEDA Kabupaten Bandung terhadap indikator kinerja tahun 2021 yang membandingkan antara target dan realisasi pada indikator sasaran adalah sebagai berikut:

3.1.1 Perbandingan Target dan Realiasi Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2021

Berikut data dan informasi Capaian kinerja yang merupakan realisasi kinerja tahun 2021 dibandingkan dengan target.

Tabel 3.1
Perbandingan Target dan Realisasi Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2021

NO	SASARAN	INDIKATOR			
		INDIKATOR KINERJA	TARGET (%)	REALISASI (%)	%
1	Meningkatnya kualitas produk perencanaan pembangunan daerah	Persentase kesesuaian program pada dokumen perencanaan terhadap dokumen penganggaran	97	100	103,09

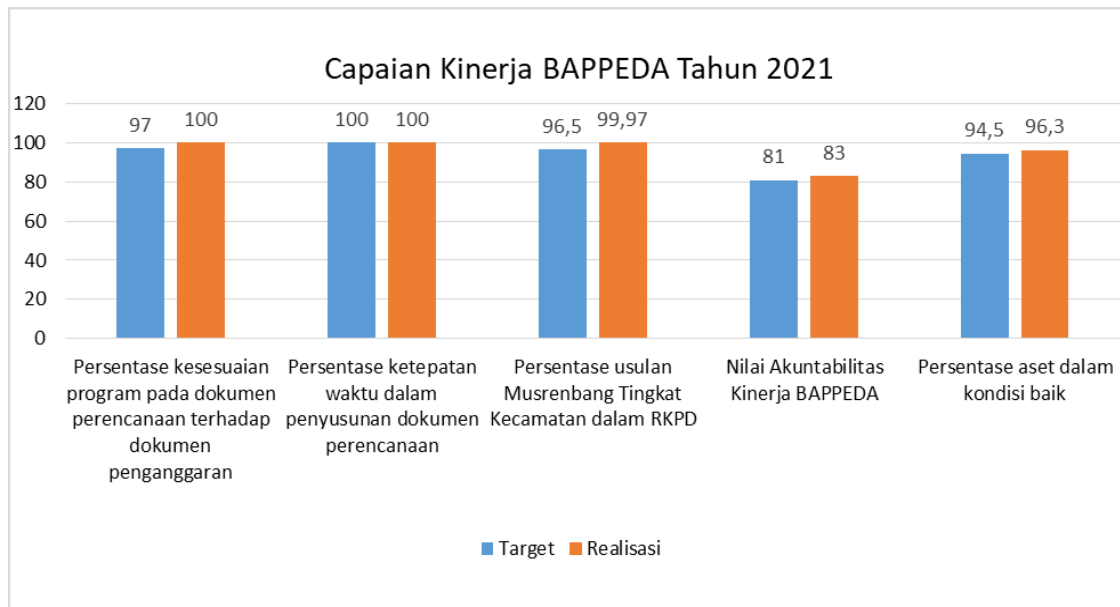
NO	SASARAN	INDIKATOR			
		INDIKATOR KINERJA	TARGET (%)	REALISASI (%)	%
		Persentase ketepatan waktu dalam penyusunan dokumen perencanaan	100	100	100
2	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan	Persentase usulan Musrenbang Tingkat Kecamatan dalam RKPD	96,5	99,97	103,59
3	Meningkatnya efektifitas tata kelola perangkat daerah BAPPEDA	Nilai Akuntabilitas Kinerja BAPPEDA	81	83	102,46
		Persentase aset dalam kondisi baik	94,5	96,30	101,90
Rata-rata			93,8	95,57	102,20

Berdasarkan tabel di atas dapat terlihat bahwa hasil perhitungan terhadap capaian kinerja sasaran tahun 2021 memiliki rata-rata capaian sebesar 95,57% dengan rerata persentase capaian sebesar 102,20%. Untuk capaian dari masing-masing indikator sasaran adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya kualitas produk perencanaan pembangunan daerah yang terdiri dari dua indikator sasaran yaitu persentase kesesuaian program pada dokumen perencanaan terhadap dokumen penganggaran sebesar 100% melebihi dari target yaitu 97% atau terealisasi sebesar 103,09% serta Persentase ketepatan waktu dalam penyusunan dokumen perencanaan dengan capaian sebesar 100% sesuai dengan target.
2. Meningkatnya peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan dengan indikator sasaran persentase usulan Musrenbang Tingkat Kecamatan dalam RKPD memiliki capaian sebesar 99,97%% dari target yaitu 96,5% atau terealisasi sebesar 103,59%.
3. Meningkatnya efektifitas tata kelola perangkat daerah BAPPEDA dengan indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja BAPPEDA sebesar 83 poin atau nilai A, melebihi dari target yaitu 81 poin (A) atau terealisasi sebesar 102,46%, dan Persentase aset dalam kondisi baik sebesar 96,30% dari target sebesar 94,50% atau terealisasi sebesar 101,90%

Dengan demikian, rata rata capaian kinerja Bappeda Kabupaten Bandung tahun 2021 adalah 95,57% melebihi dari target yaitu 93,8% atau terealisasi sebesar 102,20%. Secara umum capaian kinerja Bappeda Kabupaten Bandung melebihi target atau hasil tersebut bermakna memuaskan.

Berikut ini merupakan perbandingan target dan capaian realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) Bappeda Kabupaten Bandung Tahun 2021 :



Grafik 3.1 Grafik Perbandingan Target dan Realisasi IKU Bappeda Kab. Bandung Tahun 2021

Dilihat dari grafik perbandingan di atas untuk capaian masing-masing indikator kinerja utama (IKU) Bappeda Kabupaten Bandung Tahun 2021 telah melebihi dari target yang ditetapkan. Capaian ini merupakan capaian terakhir dari Renstra periode Tahun 2016-2021 yang berarti target akhir capaian Renstra periode tersebut dapat terpenuhi bahkan melebihi dari target. Setiap indikator sasaran didukung oleh program, kegiatan dan sub kegiatan yang menunjang dalam pemenuhan dari target capaiannya. Adapun sub kegiatan yang mendukung untuk setiap indikator sasaran adalah sebagai berikut:

3.1.1.1 Persentase kesesuaian program pada dokumen perencanaan terhadap dokumen penganggaran

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap sasaran tersebut di atas, diperoleh gambaran bahwa dari indikator sasaran tersebut menghasilkan capaian kinerja 100% atau bermakna memuaskan, indikator ini ditunjang oleh program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dan Program Penelitian dan Pengembangan. Program-program tersebut di dukung oleh kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:

1. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)

Subkegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 109.326.000 dan terealisasi sebesar Rp. 47.776.562 atau 43.70%. Alokasi dana pada subkegiatan ini digunakan untuk koordinasi dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD dan RPJMD) dan penganggaran (RKPD) bidang pemerintahan. Secara rinci subkegiatan tersebut dapat dilihat tabel dibawah ini:

Indikator	Tolok Ukur	Kinerja		
		Target	Realisasi	%
Masukan	Tersedianya Dana, SDM dan Bahan	109.326.000	47.776.562	43.70
Keluaran	Jumlah dokumen koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Pemerintahan	1 Dok	1 Dok	100

2. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 108.500.000 dan terealisasi sebesar Rp. 103.890.165 atau 95.75%. Alokasi dana subkegiatan ini digunakan untuk melaksanakan asistensi dalam hal penyusunan dokumen perencanaan pembangunan dan penganggaran Perangkat Daerah bidang Pemerintahan. Secara rinci subkegiatan tersebut dapat dilihat tabel dibawah ini:

Indikator	Tolok Ukur	Kinerja		
		Target	Realisasi	%
Masukan	Tersedianya Dana, SDM dan Bahan	108.500.000	103.890.165	95.75
Keluaran	Jumlah dokumen pelaporan hasil asistensi Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Pemerintahan	1 Dok	1 Dok	100

3. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan

Subkegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 77.500.000 dan terealisasi sebesar Rp. 51.830.981 atau 66.88%. Alokasi dana subkegiatan ini digunakan untuk pelaksanaan monitoring dan evaluasi dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan. Secara rinci subkegiatan tersebut dapat dilihat tabel dibawah ini:

Indikator	Tolok Ukur	Kinerja		
		Target	Realisasi	%
Masukan	Tersedianya Dana, SDM dan Bahan	77.500.000	51.830.981	66.88
Keluaran	Jumlah dokumen monev Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Pemerintahan	1 Dok	1 Dok	100

4. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)

Subkegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 261.674.000 dan terealisasi sebesar Rp. 212.470.981 atau 81.20%. Alokasi dana pada subkegiatan ini digunakan untuk koordinasi dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD dan RPJMD) dan penganggaran (RKPD) bidang pembangunan manusia. Secara rinci kegiatan tersebut dapat dilihat tabel dibawah ini:

Indikator	Tolok Ukur	Kinerja		
		Target	Realisasi	%
Masukan	Tersedianya Dana, SDM dan Bahan	261.674.000	212.470.981	81.20
Keluaran	- Jumlah dokumen koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Pembangunan Manusia	1 Dok	1 Dok	100

5. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia

Subkegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 132.000.000 dan terealisasi sebesar Rp. 86.840.991 atau 65.79%. Alokasi dana subkegiatan ini digunakan untuk melaksanakan asistensi dalam hal penyusunan dokumen perencanaan pembangunan dan penganggaran Perangkat Daerah bidang Pembangunan Manusia. Secara rinci subkegiatan tersebut dapat dilihat tabel dibawah ini:

Indikator	Tolok Ukur	Kinerja		
		Target	Realisasi	%
Masukan	Tersedianya Dana, SDM dan Bahan	132.000.000	86.840.991	65.79
Keluaran	Jumlah dokumen pelaporan hasil asistensi Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Pembangunan Manusia	1 Dok	1 Dok	100

6. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia

Subkegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 122.500.000 dan terealisasi sebesar Rp. 101.526.256 atau 82.88%. Alokasi dana subkegiatan ini digunakan untuk pelaksanaan monitoring dan evaluasi dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia. Secara rinci subkegiatan tersebut dapat dilihat tabel dibawah ini:

Indikator	Tolok Ukur	Kinerja		
		Target	Realisasi	%
Masukan	Tersedianya Dana, SDM dan Bahan	122.500.000	101.526.256	82.88

Indikator	Tolok Ukur	Kinerja		
		Target	Realisasi	%
Keluaran	- Jumlah dokumen monev Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Pembangunan Manusia	1 Dok	1 Dok	100

7. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)

Subkegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 218.000.000 dan terealisasi sebesar Rp. 205.288.916 atau 94.17%. Alokasi dana subkegiatan ini digunakan untuk koordinasi dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD dan RPJMD) dan penganggaran (RKPD) bidang perekonomian. Secara rinci kegiatan tersebut dapat dilihat tabel dibawah ini:

Indikator	Tolok Ukur	Kinerja		
		Target	Realisasi	%
Masukan	Tersedianya Dana, SDM dan Bahan	218.000.000	205.288.916	94.17
Keluaran	Jumlah dokumen koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Perekonomian	1 Dok	1 Dok	100

8. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian

Subkegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 310.000.000 dan terealisasi sebesar Rp. 298.081.695 atau 96.16%. Alokasi dana kegiatan ini digunakan untuk kegiatan asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang perekonomian. Secara rinci subkegiatan tersebut dapat dilihat tabel dibawah ini:

Indikator	Tolok Ukur	Kinerja		
		Target	Realisasi	%
Masukan	Tersedianya Dana, SDM dan Bahan	310.000.000		
Keluaran	Jumlah dokumen pelaporan hasil asistensi Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Perekonomian	1 Dok	1 Dok	100

9. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian

Subkegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 382.000.000 dan terealisasi sebesar Rp. 377.555.301 atau 98.84%. Alokasi dana pada subkegiatan ini digunakan untuk melaksanakan koordinasi pelaksanaan sinergitas perencanaan pembangunan daerah bidang perekonomian. Secara rinci kegiatan tersebut dapat dilihat tabel dibawah ini:

Indikator	Tolok Ukur	Kinerja		
		Target	Realisasi	%
Masukan	Tersedianya Dana, SDM dan Bahan	382.000.000	377.555.301	98.84
Keluaran	Jumlah dokumen pelaporan hasil sinergitas perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) bidang perekonomian	1 Dok	1 Dok	100

10. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)

SubKegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 389.100.000 dan terealisasi sebesar Rp. 380.673.800 atau 97,83%. Alokasi dana subkegiatan ini digunakan untuk melaksanakan koordinasi, penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD). Secara rinci kegiatan tersebut dapat dilihat tabel dibawah ini:

Indikator	Tolok Ukur	Kinerja		
		Target	Realisasi	%
Masukan	Tersedianya Dana, SDM dan Bahan	389.100.000	380.673.800	97,83
Keluaran	- Jumlah dokumen koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Infrastruktur	1 Dok	1 Dok	100

11. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur

Subkegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 94.858.000 dan terealisasi sebesar Rp. 94.851.400 atau 99.99%. Alokasi dana subkegiatan ini digunakan untuk melaksanakan asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang infrastruktur. Secara rinci kegiatan tersebut dapat dilihat tabel dibawah ini:

Indikator	Tolok Ukur	Kinerja		
		Target	Realisasi	%
Masukan	Tersedianya Dana, SDM dan Bahan	94.858.000	94.851.400	99.99
Keluaran	- Jumlah dokumen pelaporan hasil asistensi Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Infrastruktur	1 Dok	1 Dok	100

12. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur

Subkegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 151.430.000 dan terealisasi sebesar Rp. 150.821.200 atau 99.60%. Alokasi dana subkegiatan ini digunakan untuk pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang infrastruktur. Secara rinci kegiatan tersebut dapat dilihat tabel dibawah ini:

Indikator	Tolok Ukur	Kinerja		
		Target	Realisasi	%
Masukan	Tersedianya Dana, SDM dan Bahan	151.430.000	150.821.200	99.60
Keluaran	- Jumlah dokumen monev Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Infrastruktur	1 Dok	1 Dok	100

13. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)

Subkegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 172.100.000 dan terealisasi sebesar Rp. 172.100.000 atau 100%. Alokasi dana kegiatan ini digunakan untuk koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD). Secara rinci kegiatan tersebut dapat dilihat tabel dibawah ini:

Indikator	Tolok Ukur	Kinerja		
		Target	Realisasi	%
Masukan	Tersedianya Dana, SDM dan Bahan	172.100.000	172.100.000	100
Keluaran	- Jumlah dokumen koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Kewilayahan	1 Dok	1 Dok	100

14. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan

Subkegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 119.000.000 dan terealisasi sebesar Rp. 118.990.000 atau 99.99%. Alokasi dana kegiatan ini digunakan untuk pelaksanaan asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang kewilayahan. Secara rinci kegiatan tersebut dapat dilihat tabel dibawah ini:

Indikator	Tolok Ukur	Kinerja		
		119.000.000	Realisasi	%
Masukan	Tersedianya Dana, SDM dan Bahan	119.000.000	118.990.000	99.99
Keluaran	- Jumlah dokumen pelaporan hasil asistensi Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Kewilayahan	1 Dok	1 Dok	100

15. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan

Subkegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 115.570.000 dan terealisasi sebesar Rp. 115.170.000 atau 99.65%. Alokasi dana kegiatan ini digunakan untuk pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang kewilayahan. Secara rinci kegiatan tersebut dapat dilihat tabel dibawah ini:

Indikator	Tolok Ukur	Kinerja		
		Target	Realisasi	%
Masukan	Tersedianya Dana, SDM dan Bahan	115.570.000	115.170.000	99.65
Keluaran	- Jumlah dokumen monev Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Kewilayahan	1 Dok	1 Dok	100

16. Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan

Subkegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 303.100.000 dan terealisasi sebesar Rp. 297.845.823 atau 98.27%. Alokasi dana subkegiatan ini digunakan untuk pengelolaan data kelitbangan dan peraturan di lingkup Kabupaten Bandung. Secara rinci subkegiatan tersebut dapat dilihat tabel dibawah ini:

Indikator	Tolok Ukur	Kinerja		
		Target	Realisasi	%
Masukan	Tersedianya Dana, SDM dan Bahan	303.100.000	297.845.823	98.27
Keluaran	- Jumlah dokumen pengelolaan data kelitbangan dan peraturan	1 Dok	1 Dok	100

17. Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Subkegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 281.305.500 dan terealisasi sebesar Rp. 279.705.320 atau 99.43%. Alokasi dana subkegiatan ini digunakan untuk melaksanakan penelitian dan pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah. Secara rinci kegiatan tersebut dapat dilihat tabel dibawah ini:

Indikator	Tolok Ukur	Kinerja		
		Target	Realisasi	%
Masukan	Tersedianya Dana, SDM dan Bahan	281.305.500	279.705.320	99.43
Keluaran	Jumlah dokumen hasil Penelitian dan Pengembangana Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	1 Dok	1 Dok	100

18. Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika

Subkegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 84.135.500 dan terealisasi sebesar Rp. 80.799.500 atau 96.03%. Alokasi dana subkegiatan ini digunakan untuk melaksanakan penelitian dan pengembangan komunikasi dan informatika. Secara rinci kegiatan tersebut dapat dilihat tabel dibawah ini:

Indikator	Tolok Ukur	Kinerja		
		Target	Realisasi	%
Masukan	Tersedianya Dana, SDM dan Bahan	84.135.500	80.799.500	96.03
Keluaran	Jumlah dokumen hasil Penelitian dan Pengembangana Komunikasi dan Informatika	1 Dok	1 Dok	100

19. Penelitian, Pengembangan, dan Perencanaan di Bidang Teknologi dan Inovasi

Subkegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 313.000.000 dan terealisasi sebesar Rp. 285.200.563 atau 91.12%. Alokasi dana subkegiatan ini digunakan untuk melaksanakan penelitian, pengembangan, dan perencanaan di bidang teknologi dan inovasi. Secara rinci kegiatan tersebut dapat dilihat tabel dibawah ini:

Indikator	Tolok Ukur	Kinerja		
		Target	Realisasi	%
Masukan	Tersedianya Dana, SDM dan Bahan	313.000.000	285.200.563	91.12
Keluaran	Jumlah dokumen inovasi daerah	1 Dok	1 Dok	100

Capaian kinerja indikator sasaran ini dihitung berdasarkan kesesuaian program yang telah direncanakan dalam RKPD tahun 2021 dengan program yang dianggarkan pada APBD tahun anggaran 2021, yakni sebanyak 149 program yang direncanakan di RKPD serta 152 program dianggarkan pada APBD jadi terdapat 3 program yang berbeda. Maka nilai indikator persentase kesesuaian program pada dokumen perencanaan terhadap dokumen penganggaran dihitung dari: $(152-3) / 149 \times 100\% = 100\%$.

Berdasarkan hasil perhitungan terhadap capaian kinerja sasaran "Meningkatnya kualitas produk perencanaan pembangunan daerah" untuk indikator sasaran "Persentase kesesuaian Program pada Dokumen Perencanaan terhadap Dokumen Penganggaran", diperoleh gambaran bahwa dari indikator sasaran tersebut menghasilkan capaian kinerja 100% atau bermakna memuaskan.

3.1.1.2 Persentase ketepatan waktu dalam penyusunan dokumen perencanaan



Berdasarkan hasil evaluasi terhadap sasaran tersebut di atas, diperoleh gambaran bahwa dari indikator sasaran tersebut menghasilkan capaian kinerja 100% atau bermakna memuaskan, Indikator ini ditunjang oleh

subkegiatan sebagai berikut:

1. Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah Rancangan RKPD

Subkegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 177.792.750 dan terealisasi sebesar Rp. 157.600.372 atau 88.64%. Alokasi dana subkegiatan ini digunakan untuk melaksanakan analisis kondisi daerah, permasalahan, dan isu strategis pembangunan daerah. Secara rinci kegiatan tersebut dapat dilihat tabel dibawah ini:

Indikator	Tolok Ukur	Kinerja		
		Target	Realisasi	%
Masukan	Tersedianya Dana, SDM dan Bahan	177.792.750	157.600.372	88.64
Keluaran	Jumlah dokumen Ranwal RKPD dan Dokumen Rancangan Awal RPJMD)	1 Dok	1 Dok	100

2. Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya

Subkegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 73.411.200 dan terealisasi sebesar Rp. 69.892.600 atau 95,21%. Alokasi dana subkegiatan ini digunakan untuk melaksanakan koordinasi penelaahan dokumen perencanaan pembangunan daerah dengan dokumen kebijakan lainnya. Secara rinci kegiatan tersebut dapat dilihat tabel dibawah ini:

Indikator	Tolok Ukur	Kinerja		
		Target	Realisasi	%
Masukan	Tersedianya Dana, SDM dan Bahan	73.411.200	69.892.600	95,21
Keluaran	1. Jumlah Dokumen Usulan DAK 2. Jumlah Dokumen Usulan Bantuan Keuangan Gubernur 3. Jumlah Dokumen Perda SPPD	3 Dok	3 Dok	100

3. Pelaksanaan Konsultasi Publik

Subkegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 119.496.000 dan terealisasi sebesar Rp. 114.099.780 atau 95,48%. Alokasi dana subkegiatan ini digunakan untuk pelaksanaan konsultasi publik dalam penyusunan RPJMD

dan RKPD. Secara rinci subkegiatan tersebut dapat dilihat tabel dibawah ini:

Indikator	Tolok Ukur	Kinerja		
		Target	Realisasi	%
Masukan	Tersedianya Dana, SDM dan Bahan	119.496.000	114.099.780	95,48
Keluaran	Jumlah pelaksanaan Konsultasi Publik RPJMD dan RKPD	2 Keg	2 Keg	100

4. Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD

Subkegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 60.650.050 dan terealisasi sebesar Rp. 47.500.000 atau 78,32%. Alokasi dana subkegiatan ini digunakan untuk melaksanakan forum SKPD/Lintas SKPD dalam hal konsolidasi usulan hasil musrenbang Kecamatan. Secara rinci subkegiatan tersebut dapat dilihat tabel dibawah ini:

Indikator	Tolok Ukur	Kinerja		
		Target	Realisasi	%
Masukan	Tersedianya Dana, SDM dan Bahan	60.650.050	47.500.000	78.32
Keluaran	Jumlah pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	1 Keg	1 Keg	100

5. Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota

Subkegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 865.846.630 dan terealisasi sebesar Rp. 688.296.576 atau 79.49%. Alokasi dana subkegiatan ini digunakan untuk melaksanakan koordinasi penyusunan dan penetapan dokumen perencanaan pembangunan daerah kabupaten Bandung. Secara rinci subkegiatan tersebut dapat dilihat tabel dibawah ini:

Indikator	Tolok Ukur	Kinerja		
		Target	Realisasi	%
Masukan	Tersedianya Dana, SDM dan Bahan	865.846.630	688.296.576	79.49

Indikator	Tolok Ukur	Kinerja		
		Target	Realisasi	%
Keluaran	Jumlah dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (Dokumen RKPD, Dokumen RKPD Perubahan, Dokumen RPJMD)	3 Dok	3 Dok	100

6. Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah

Subkegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 225.497.000 dan terealisasi sebesar Rp. 219.383.200 atau 97.29%. Alokasi dana subkegiatan ini digunakan untuk melaksanakan analisis data dan informasi perencanaan pembangunan daerah sebagai bahan penyusunan dokumen perencanaan. Secara rinci subkegiatan tersebut dapat dilihat tabel dibawah ini:

Indikator	Tolok Ukur	Kinerja		
		Target	Realisasi	%
Masukan	Tersedianya Dana, SDM dan Bahan	225.497.000	219.383.200	97.29
Keluaran	- Jumlah Dokumen Analisa Pembangunan - Jumlah Dokumen E-Database SIPD Kabupaten bandung	2 Dok	2 Dok	100

7. Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD

Subkegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 328.757.300 dan terealisasi sebesar Rp. 322.760.000 atau 98.18%. Alokasi dana subkegiatan ini digunakan untuk melaksanakan pembinaan dan pemanfaatan data dan informasi perencanaan pembangunan bagi Perangkat Daerah. Secara rinci subkegiatan tersebut dapat dilihat tabel dibawah ini:

Indikator	Tolok Ukur	Kinerja		
		Target	Realisasi	%
Masukan	Tersedianya Dana, SDM dan Bahan	328.757.300	322.760.000	98.18

Indikator	Tolok Ukur	Kinerja		
		Target	Realisasi	%
Keluaran	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah Dokumen Prosiding Satu Data Kabupaten Bandung (SDKB) - Jumlah Updating Aplikasi Perencanaan 	2 Dok	2 Dok	100

8. Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota

Subkegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 239.105.193 dan terealisasi sebesar Rp. 277.554.756 atau 95.17%. Alokasi dana subkegiatan ini digunakan untuk penyusunan profil pembangunan daerah Kabupaten Bandung. Secara rinci subkegiatan tersebut dapat dilihat tabel dibawah ini:

Indikator	Tolok Ukur	Kinerja		
		Target	Realisasi	%
Masukan	Tersedianya Dana, SDM dan Bahan	239.105.193	277.554.756	95.17
Keluaran	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah Dokumen Profil Pelaksanaan kegiatan dan sub kegiatan kewilayahan - Jumlah Video dan Buku Saku Profil Data Perencanaan Pembangunan - Jumlah dokumen Prosiding 	3 Dok	3 Dok	100

9. Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota

Subkegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 242.436.000 dan terealisasi sebesar Rp. 230.681.971 atau 95.15%. Alokasi dana subkegiatan ini digunakan untuk melaksanakan koordinasi pengendalian perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di Kabupaten Bandung. Secara rinci subkegiatan tersebut dapat dilihat tabel dibawah ini:

Indikator	Tolok Ukur	Kinerja		
		Target	Realisasi	%
Masukan	Tersedianya Dana, SDM dan Bahan	242.436.000	230.681.971	95.15

Indikator	Tolok Ukur	Kinerja		
		Target	Realisasi	%
Keluaran	Jumlah Dokumen Monitoring Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Pendampingan Aplikasi SIPD	1 Dok	1 Dok	100

10. Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah

Subkegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 166.518.500 dan terealisasi sebesar Rp. 161.210.125 atau 96.81%. Alokasi dana subkegiatan ini digunakan untuk melaksanakan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan berkala pelaksanaan pembangunan daerah. Secara rinci subkegiatan tersebut dapat dilihat tabel dibawah ini:

Indikator	Tolok Ukur	Kinerja		
		Target	Realisasi	%
Masukan	Tersedianya Dana, SDM dan Bahan	166.518.500	230.681.971	96.81
Keluaran	- Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Laporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah - Jumlah dokumen pelaporan capaian pembangunan	2 Dok	2 Dok	100

Berdasarkan hasil perhitungan terhadap capaian kinerja sasaran “Meningkatnya kualitas produk perencanaan pembangunan daerah” untuk indikator sasaran “Persentase ketepatan waktu dalam penyusunan dokumen perencanaan”, diperoleh gambaran bahwa dari indikator sasaran tersebut menghasilkan capaian kinerja 100% atau bermakna memuaskan.

Capaian kinerja ini berdasarkan jumlah dokumen tepat waktu (Dokumen RKPD, RPJMD, dan RKPD Perubahan), yakni sebanyak 3 dokumen terhadap total dokumen yang harus tepat waktu sebanyak 3 dokumen, maka persentasenya adalah $3/3 \times 100\% = 100\%$.

3.1.1.3 Persentase Usulan Musrenbang Tingkat Kecamatan dalam RKPD



Berdasarkan hasil evaluasi terhadap sasaran tersebut di atas, diperoleh gambaran bahwa dari indikator sasaran tersebut menghasilkan

capaian kinerja 99,97% atau bermakna memuaskan. Indikator ini ditunjang oleh subkegiatan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota

Subkegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 478.329.000 dan terealisasi sebesar Rp. 430.950.374 atau 90.09%. Alokasi dana subkegiatan ini digunakan untuk melaksanakan Murenbang RKPD dan RPJMD . Secara rinci kegiatan tersebut dapat dilihat tabel dibawah ini:

Indikator	Tolok Ukur	Kinerja		
		Target	Realisasi	%
Masukan	Tersedianya Dana, SDM dan Bahan	478.329.000	430.950.374	90.09
Keluaran	1. Jumlah penyelenggaraan Musrenbang RKPD 2. Jumlah penyelenggaraan Musrenbang RPJMDDaerah (SPPD)	2 Keg	2 Keg	100

Berdasarkan hasil perhitungan terhadap capaian kinerja sasaran “Meningkatnya peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan” untuk indikator sasaran “Persentase usulan Musrenbang Tingkat Kecamatan dalam RKPD ”, diperoleh gambaran bahwa dari indikator sasaran tersebut menghasilkan capaian kinerja 99,97% atau bermakna memuaskan.

Capaian kinerja ini berdasarkan Jumlah DSP Kecamatan yang ditetapkan dalam RKPD, yakni sebanyak 3.396 usulan terhadap total usulan DSP kecamatan sebanyak 3.397 usulan, maka persentasenya adalah $3.396/3.397 \times 100\% = 99,97\%$.

3.1.1.4 Nilai Akuntabilitas Kinerja BAPPEDA

Indikator sasaran ini didukung oleh subkegiatan sebagai berikut:

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Subkegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 246.000.000 dan terealisasi sebesar Rp. 240.285.319 atau 97,68%. Alokasi dana subkegiatan ini digunakan untuk penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah yaitu Renstra dan Renja. Secara rinci subkegiatan tersebut dapat dilihat tabel dibawah ini:

Indikator	Tolok Ukur	Kinerja		
		Target	Realisasi	%
Masukan	Tersedianya Dana, SDM dan Bahan	246.000.000	240.285.319	97,68
Keluaran	Jumlah dokumen Renstra dan Renja yang diselesaikan	2 Dok	2 Dok	100

2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD

Subkegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 5.000.000 dan terealisasi sebesar Rp. 3.127.500 atau 62,55%. Alokasi dana subkegiatan ini digunakan untuk koordinasi dalam hal penyusunan dokumen RKA Bappeda Kab. Bandung. Secara rinci skegiatan tersebut dapat dilihat tabel dibawah ini:

Indikator	Tolok Ukur	Kinerja		
		Target	Realisasi	%
Masukan	Tersedianya Dana, SDM dan Bahan	5.000.000	3.127.500	62,55
Keluaran	Jumlah dokumen RKA-SKPD	1 Dok	1 Dok	100

3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 5.000.000 dan terealisasi sebesar Rp. 3.678.400 atau 73,57%. Alokasi dana subkegiatan ini digunakan untuk penyusunan dokumen perubahan RKA Bappeda Ka. Secara rinci kegiatan tersebut dapat dilihat tabel dibawah ini:

Indikator	Tolok Ukur	Kinerja		
		Target	Realisasi	%
Masukan	Tersedianya Dana, SDM dan Bahan	202.980.000	200.054.500	98,56

Indikator	Tolok Ukur	Kinerja		
		Target	Realisasi	%
Keluaran	Jumlah pelayanan kebersihan kantor dan halaman	12 Bulan	12 Bulan	100

4. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD

Subkegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 5.000.000 dan terealisasi sebesar Rp. 0 atau 0 %. Alokasi dana subkegiatan ini digunakan untuk koordinasi dan penyusunan DPA Bappeda Kabupaten Bandung Tahun 2021. Secara rinci kegiatan tersebut dapat dilihat tabel dibawah ini:

Indikator	Tolok Ukur	Kinerja		
		Target	Realisasi	%
Masukan	Tersedianya Dana, SDM dan Bahan	5.000.000	0	0
Keluaran	Jumlah dokumen DPA-SKPD	1 Dok	1 Dok	100

5. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD

Subkegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 5.000.000 dan terealisasi sebesar Rp. 1.951.091 atau 39.02%. Alokasi dana subkegiatan ini digunakan untuk koordinasi dan penyusunan DPA Perubahan Bappeda Tahun 2021. Secara rinci subkegiatan tersebut dapat dilihat tabel dibawah ini:

Indikator	Tolok Ukur	Kinerja		
		Target	Realisasi	%
Masukan	Tersedianya Dana, SDM dan Bahan	5.000.000	1.951.091	39.02
Keluaran	Jumlah dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dok	1 Dok	100

6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Subkegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 67.149.904 dan terealisasi sebesar Rp. 64.815.542 atau 96.52%. Alokasi dana subkegiatan ini digunakan untuk penyusunan dokumen LKIP Bappeda yang diselesaikan secara tepat waktu. Secara rinci subkegiatan tersebut dapat dilihat tabel dibawah ini:

Indikator	Tolok Ukur	Kinerja		
		Target	Realisasi	%
Masukan	Tersedianya Dana, SDM dan Bahan	67.149.904	64.815.542	96.52
Keluaran	Jumlah dokumen LKIP PD yang diselesaikan secara tepat waktu	1 Dok	1 Dok	100

7. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Subkegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 93.095.300 dan terealisasi sebesar Rp. 87.722.750 atau 94.23%. Alokasi dana subkegiatan ini digunakan untuk penyusunan dokumen evaluasi kinerja Bappeda Tahun 2021. Secara rinci kegiatan tersebut dapat dilihat tabel dibawah ini:

Indikator	Tolok Ukur	Kinerja		
		Target	Realisasi	%
Masukan	Tersedianya Dana, SDM dan Bahan	20.945.000	20.945.000	100
Keluaran	- Jumlah dokumen laporan tahunan yang diselesaikan secara tepat waktu	1 Dok	1 Dok	100
	- Jumlah dokumen laporan triwulanan yang diselesaikan secara tepat waktu	1 Dok	1 Dok	100
	- Jumlah dokumen evaluasi renstra dan renja yang diselesaikan secara tepat waktu	1 Dok	1 Dok	100

8. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

Subkegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 48.000.000 dan terealisasi sebesar Rp. 32.989.980 atau 68.73%. Alokasi dana subkegiatan ini digunakan untuk penyusunan laporan realisasi anggaran serta dokumen CALK Bappeda. Secara rinci subkegiatan tersebut dapat dilihat tabel dibawah ini:

Indikator	Tolok Ukur	Kinerja		
		Target	Realisasi	%
Masukan	Tersedianya Dana, SDM dan Bahan	48.000.000	32.989.980	68.73
Keluaran	- Jumlah laporan realisasi anggaran yang diselesaikan secara tepat waktu - Jumlah dokumen CALK	1 Dok	1 Dok	100

9. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

Subkegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 31.200.000 dan terealisasi sebesar Rp. 27.771.200 atau 89.01%. Alokasi dana subkegiatan ini digunakan untuk penyusunan laporan rekonsiliasi keuangan bulanan/triwulanan/semesteran yang diselesaikan secara tepat waktu. Secara rinci kegiatan tersebut dapat dilihat tabel dibawah ini:

Indikator	Tolok Ukur	Kinerja		
		Target	Realisasi	%
Masukan	Tersedianya Dana, SDM dan Bahan	31.200.000	27.771.200	89.01
Keluaran	Jumlah laporan rekonsiliasi keuangan bulanan/triwulanan/semesteran yang diselesaikan secara tepat waktu	1 Dok	1 Dok	100

10. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran

Subkegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 50.000.000 dan terealisasi sebesar Rp. 48.026.926 atau 96.05%. Alokasi dana subkegiatan ini digunakan untuk penyusunan laporan prognosis realisasi anggaran yang diselesaikan secara tepat waktu. Secara rinci subkegiatan tersebut dapat dilihat tabel dibawah ini:

Indikator	Tolok Ukur	Kinerja		
		Target	Realisasi	%
Masukan	Tersedianya Dana, SDM dan Bahan	50.000.000	48.026.926	96.05

Indikator	Tolok Ukur	Kinerja		
		Target	Realisasi	%
Keluaran	Jumlah laporan prognosis realisasi anggaran yang diselesaikan secara tepat waktu	1 Dok	1 Dok	100

11. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya

Subkegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 110.750.000 dan terealisasi sebesar Rp. 101.675.000 atau 91.81%. Alokasi dana kegiatan ini digunakan untuk penyediaan makanan dan minuman rapat dan tamu. Secara rinci kegiatan tersebut dapat dilihat tabel dibawah ini:

Indikator	Tolok Ukur	Kinerja		
		Target	Realisasi	%
Masukan	Tersedianya Dana, SDM dan Bahan	110.750.000	101.675.000	91.81
Keluaran	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang dibutuhkan	79 Stel	79 Stel	100

12. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

Subkegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 74.102.097 dan terealisasi sebesar Rp. 68.591.300 atau 92.56%. Alokasi dana kegiatan ini digunakan untuk pegawai yang mengikuti bimbingan teknis peraturan dan perundang-undangan. Secara rinci subkegiatan tersebut dapat dilihat tabel dibawah ini:

Indikator	Tolok Ukur	Kinerja		
		Target	Realisasi	%
Masukan	Tersedianya Dana, SDM dan Bahan	74.300.000	74.099.516	99.73
Keluaran	Jumlah pegawai yang mengikuti bimbingan teknis peraturan perundang-undangan	40 orang		

13. Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Subkegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 27.000.000 dan terealisasi sebesar Rp. 16.059.300 atau 59.48%. Alokasi dana subkegiatan ini

digunakan untuk pemenuhan jasa surat masuk dan surat keluar. Secara rinci kegiatan tersebut dapat dilihat tabel dibawah ini:

Indikator	Tolok Ukur	Kinerja		
		Target	Realisasi	%
Masukan	Tersedianya Dana, SDM dan Bahan	27.000.000	16.059.300	59.48
Keluaran	Jumlah penerimaan surat masuk dan pembuatan surat keluar	4.000 buah	4.563 buah	114.07

14. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Subkegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 110.247.668 dan terealisasi sebesar Rp. 79.335.299 atau 71.96%. Alokasi dana subkegiatan ini digunakan untuk pemenuhan pembayaran jasa layanan komunikasi, air dan listrik. Secara rinci subkegiatan tersebut dapat dilihat tabel dibawah ini:

Indikator	Tolok Ukur	Kinerja		
		Target	Realisasi	%
Masukan	Tersedianya Dana, SDM dan Bahan	110.247.668	79.335.299	71.96
Keluaran	Jumlah bulan pembayaran jasa layanan komunikasi, air dan listrik	12 bulan	12 bulan	100

15. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Subkegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 1.075.520.000 dan terealisasi sebesar Rp. 1.036.814.485 atau 96.40%. Alokasi dana subkegiatan ini digunakan untuk pemenuhan pembayaran jasa pelayanan umum (meliputi penyediaan jasa kebersihan, Tenaga Keamanan dan Tenaga Harian Lepas (THL). Secara rinci subkegiatan tersebut dapat dilihat tabel dibawah ini:

Indikator	Tolok Ukur	Kinerja		
		Target	Realisasi	%
Masukan	Tersedianya Dana, SDM dan Bahan	18.350.000	7.267.345	39.60

Indikator	Tolok Ukur	Kinerja		
		Target	Realisasi	%
Keluaran	Jumlah bulan pembayaran jasa pelayanan umum (meliputi penyediaan jasa kebersihan, Tenaga Keamanan dan Tenaga Harian Lepas (THL)	12 bulan	12 bulan	100

16. Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Subkegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 20.000.000 dan terealisasi sebesar Rp. 19.973.183 atau 99.87%. Alokasi dana subkegiatan ini digunakan untuk pemenuhan bahan logistik kantor yang dibeli. Secara rinci kegiatan tersebut dapat dilihat tabel dibawah ini:

Indikator	Tolok Ukur	Kinerja		
		Target	Realisasi	%
Masukan	Tersedianya Dana, SDM dan Bahan	20.000.000	19.973.183	99.87
Keluaran	Jumlah satuan bahan logistik kantor yang dibeli)	3 Jenis	3 Jenis	100

17. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Subkegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 37.057.458 dan terealisasi sebesar Rp. 11.185.977 atau 30.19%. Alokasi dana subkegiatan ini digunakan untuk pemenuhan barang yang cetak dan penggandaan. Secara rinci subkegiatan tersebut dapat dilihat tabel dibawah ini:

Indikator	Tolok Ukur	Kinerja		
		Target	Realisasi	%
Masukan	Tersedianya Dana, SDM dan Bahan	37.057.458	11.185.977	30.19
Keluaran	Jumlah satuan barang yang dicetak dan digandakan	15 Jenis	14 Jenis	93

18. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Subkegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 38.000.000 dan terealisasi sebesar Rp. 38.000.000 atau 100%. Alokasi dana subkegiatan ini digunakan untuk pemenuhan jenis komponen instalasi listrik/penerangan

yang dibeli. Secara rinci subkegiatan tersebut dapat dilihat tabel dibawah ini:

Indikator	Tolok Ukur	Kinerja		
		Target	Realisasi	%
Masukan	Tersedianya Dana, SDM dan Bahan	38.000.000	38.000.000	100
Keluaran	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan yang dibeli	21 Jenis	21 Jenis	100

19. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Subkegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 935.000.000 dan terealisasi sebesar Rp. 899.795.700 atau 96.23%. Alokasi dana subkegiatan ini digunakan untuk pengadaan alat tulis kantor serta peralatan serta perlengkapan kantor Bappeda Tahun 2021. Secara rinci subkegiatan tersebut dapat dilihat tabel dibawah ini:

Indikator	Tolok Ukur	Kinerja		
		Target	Realisasi	%
Masukan	Tersedianya Dana, SDM dan Bahan	935.000.000	899.795.700	96.23
Keluaran	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor	63 Jenis	63 Jenis	100

20. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Subkegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 60.000.000 dan terealisasi sebesar Rp. 59.807.000 atau 99.68%. Alokasi dana subkegiatan ini digunakan untuk pemenuhan peralatan rumah tangga di Bappeda Tahun 2021. Secara rinci subkegiatan tersebut dapat dilihat tabel dibawah ini:

Indikator	Tolok Ukur	Kinerja		
		Target	Realisasi	%
Masukan	Tersedianya Dana, SDM dan Bahan	60.000.000	59.807.000	99.68
Keluaran	Jumlah jenis peralatan rumah tangga yang dibeli	5 Jenis	5 Jenis	100

21. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Subkegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 10.945.000 dan terealisasi

sebesar Rp. 9.197.700 atau 84.04%. Alokasi dana subkegiatan ini digunakan untuk pemenuhan bahan bacaan atau surat kabar. Secara rinci subkegiatan tersebut dapat dilihat tabel dibawah ini:

Indikator	Tolok Ukur	Kinerja		
		Target	Realisasi	%
Masukan	Tersedianya Dana, SDM dan Bahan	10.945.000	9.197.700	84.04
Keluaran	Jumlah bahan bacaan yang dibeli	3 Jenis	3 Jenis	100

22. Penyediaan Fasilitas Kunjungan Tamu

Subkegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 51.142.500 dan terealisasi sebesar Rp. 12.450.000 atau 24.34%. Alokasi dana subkegiatan ini digunakan untuk pemenuhan makanan dan minuman kunjungan tamu ke Bappeda Tahun 2021. Secara rinci subkegiatan tersebut dapat dilihat tabel dibawah ini:

Indikator	Tolok Ukur	Kinerja		
		Target	Realisasi	%
Masukan	Tersedianya Dana, SDM dan Bahan	10.945.000	9.197.700	84.04
Keluaran	Jumlah orang yang mendapatkan makanan dan minuman	250 Box	215 Box	86

23. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Subkegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 90.500.000 dan terealisasi sebesar Rp. 84.114.667 atau 92.94%. Alokasi dana subkegiatan ini digunakan untuk rapat koordinasi dan konsultasi Bappeda Tahun 2021. Secara rinci subkegiatan tersebut dapat dilihat tabel dibawah ini:

Indikator	Tolok Ukur	Kinerja		
		Target	Realisasi	%
Masukan	Tersedianya Dana, SDM dan Bahan	90.500.000	84.114.667	92.94
Keluaran	Jumlah orang yang melaksanakan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	250 Hok	234 Hok	93.60

Capaian kinerja ini berdasarkan hasil penilaian kinerja oleh tim inspektorat, yaitu 83 poin (A) dari target 81 poin (A).

Berdasarkan hasil perhitungan terhadap capaian kinerja sasaran “Meningkatnya efektifitas tata kelola perangkat daerah BAPPEDA” untuk indikator sasaran “Nilai Akuntabilitas Kinerja BAPPEDA”, diperoleh gambaran bahwa dari indikator sasaran tersebut menghasilkan capaian kinerja 83 poin (nilai Akip A) atau bermakna memuaskan.

1.1.1.5 Persentase aset dalam kondisi baik



Berdasarkan hasil evaluasi terhadap sasaran tersebut di atas, diperoleh gambaran bahwa dari indikator sasaran tersebut menghasilkan capaian kinerja 98,58% atau bermakna memuaskan. Indikator ini ditunjang oleh subkegiatan

sebagai berikut:

1. Pengadaan Mebel

Subkegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 60.000.000 dan terealisasi sebesar Rp. 58.350.000 atau 97.25%. Alokasi dana subkegiatan ini digunakan untuk pengadaan mebel kantor Bappeda Tahun 2021. Secara rinci subkegiatan tersebut dapat dilihat tabel dibawah ini:

Indikator	Tolok Ukur	Kinerja		
		Target	Realisasi	%
Masukan	Tersedianya Dana, SDM dan Bahan	60.000.000	58.350.000	97.25
Keluaran	Jumlah pengadaan mebel	1 Paket	1 Paket	100

2. Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor atau bangunan lainnya

Subkegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 389.750.000 dan terealisasi sebesar Rp. 386.450.000 atau 99.15%. Alokasi dana subkegiatan ini digunakan untuk pemeliharaan gedung kantor Bappeda Tahun 2021. Secara rinci subkegiatan tersebut dapat dilihat tabel dibawah ini:

Indikator	Tolok Ukur	Kinerja		
		Target	Realisasi	%
Masukan	Tersedianya Dana, SDM dan Bahan	389.750.000	386.450.000	99.15
Keluaran	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	1 paket	1 paket	100

3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Subkegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 201.350.000 dan terealisasi sebesar Rp. 151.917.492 atau 75.45%. Alokasi dana subkegiatan ini digunakan untuk pemeliharaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan . Secara rinci subkegiatan tersebut dapat dilihat tabel dibawah ini:

Indikator	Tolok Ukur	Kinerja		
		Target	Realisasi	%
Masukan	Tersedianya Dana, SDM dan Bahan	201.350.000	151.917.492	75.45
Keluaran	Jumlah kendaraan yang dipelihara	34 Unit	34 Unit	100

4. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Subkegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 290.000.000 dan terealisasi sebesar Rp. 276.225.250 atau 95.25%. Alokasi dana subkegiatan ini digunakan untuk pemeliharaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan . Secara rinci subkegiatan tersebut dapat dilihat tabel dibawah ini:

Indikator	Tolok Ukur	Kinerja		
		Target	Realisasi	%
Masukan	Tersedianya Dana, SDM dan Bahan	290.000.000	276.225.250	95.25
Keluaran	Jumlah rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor	1 paket	1 paket	100

Berdasarkan hasil perhitungan terhadap capaian kinerja sasaran “Meningkatnya efektifitas tata kelola perangkat daerah BAPPEDA” untuk indikator sasaran “Persentase aset dalam kondisi baik”, diperoleh gambaran bahwa dari indikator sasaran tersebut menghasilkan capaian kinerja 98,58 %.

Capaian kinerja ini berdasarkan Jumlah Aset Baik, yakni sebanyak 841 jenis, terhadap total aset sebanyak 873 jenis, dengan total aset rusak berat sebanyak 32 jenis, maka persentasenya adalah $841 / 873 \times 100\% = 96,30\%$.

3.1.2 Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Strategis

Berdasarkan uraian hasil capaian kinerja Bappeda Tahun 2021, berikut ini merupakan perbandingan capaian kinerja tahun 2020, perbandingan mengacu pada Renstra Perubahan.

Tabel 3.3
Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Strategis

NO	SASARAN	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA		%
			2020	2021	
1	Meningkatnya kualitas produk perencanaan pembangunan daerah	Persentase kesesuaian program pada dokumen perencanaan terhadap dokumen penganggaran	100	100	100
		Persentase ketepatan waktu dalam penyusunan dokumen perencanaan	100	100	100
2	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan	Persentase usulan Musrenbang Tingkat Kecamatan dalam RKPD	94,72	99,97	105,54
3	Meningkatnya efektifitas tata kelola perangkat daerah BAPPEDA	Nilai Akuntabilitas Kinerja BAPPEDA	82,78	83	100,26
		Persentase aset dalam kondisi baik	98,64	96,30	97,62
Rata-rata			95,23	95,57	100,68



Grafik 3.1 Grafik Perbandingan Realisasi IKU Bappeda Kab. Bandung Tahun 2020 dan Tahun 2021

Berdasarkan grafik di atas dapat dilihat bahwa secara garis besar capaian kinerja pada tahun 2021 dibandingkan dengan tahun 2020 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan target. Namun pada indikator persentase aset dalam kondisi baik, capaian pada tahun 2021 lebih rendah dibandingkan dengan capaian tahun 2020 tetapi telah melebihi dari target. Berdasarkan grafik di atas dapat disimpulkan bahwa perbandingan capaian kinerja tahun 2020 dan 2021 adalah sebagai berikut:

1. Capaian kinerja untuk sasaran meningkatnya kualitas produk perencanaan pembangunan daerah dengan indikator sasaran persentase kesesuaian program pada dokumen perencanaan terhadap dokumen penganggaran adalah sebesar 100% sama dengan capaian tahun 2020. Hal yang sama juga terjadi untuk indikator Persentase ketepatan waktu dalam penyusunan dokumen perencanaan pada tahun 2021 adalah sebesar 100% sama seperti tahun 2020.
2. Capaian kinerja untuk sasaran meningkatnya peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan dengan indikator sasaran persentase usulan Musrenbang Tingkat Kecamatan dalam RKP adalah sebesar 99,97% dibanding realisasi tahun 2020 sebesar 94,72% atau mengalami peningkatan sebesar 5,25%.
3. Capaian kinerja untuk sasaran meningkatnya efektifitas tata kelola perangkat daerah BAPPEDA dengan indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja BAPPEDA sebesar 83 poin (A) dibanding tahun 2020 sebesar 82,78 poin (A) atau mengalami peningkatan sebesar 0,22 poin, sedangkan capaian kinerja untuk

indikator persentase aset dalam kondisi baik sebesar 96,3% mengalami penurunan dibandingkan tahun 2020 sebesar 98,64%, namun capaian tersebut telah melebihi dari target tahun 2021.

Secara rata-rata capaian kinerja Bappeda Kabupaten Bandung tahun 2021 adalah sebesar 102,20%.

3.1.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2021 Terhadap Target Jangka Menengah Renstra Perubahan Bappeda Kabupaten Bandung Tahun 2016 – 2021.

Berikut merupakan capaian kinerja Bappeda dengan membandingkan realisasi kinerja sampai tahun 2020 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Bappeda Tahun 2016-2021.

Tabel 3.4
Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2020 Terhadap Target Jangka Menengah Renstra Perubahan Bappeda Kabupaten Bandung Tahun 2016 – 2021

Sasaran	Indikator	Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Meningkatnya kualitas produk perencanaan pembangunan daerah	Persentase kesesuaian program pada dokumen perencanaan terhadap dokumen penganggaran	91	94,55	92	95,54	93	95,96	96,20	96,76	96,50	100	100	100
	Persentase ketepatan waktu dalam penyusunan dokumen perencanaan	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Meningkatnya peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan	Persentase usulan Musrenbang Tingkat Kecamatan dalam RKPD	-	91,11	93	95,45	94	95,59	95,70	98,04	96	94,72	96,5	99,97
Meningkatnya efektifitas tata kelola perangkat daerah BAPPEDA	Nilai Akuntabilitas Kinerja BAPPEDA	-	B (69)	B (67)	BB (75,45)	B (68)	BB (77,33)	BB (78)	A (81,72)	BB (80)	A (82,78)	81 (A)	83 (A)
	Persentase aset dalam kondisi baik		90,62	91	92,14	92	93,57	93,70	99,48	94	98,64	94,5	96,3

Jika dilihat pada tabel di atas pada rentang tahun 2016 sampai dengan 2021 capaian kinerja BAPPEDA selalu melebihi dari target yang ditetapkan. Capaian kinerja BAPPEDA tahun 2016-2021 selalu meningkat setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan komitmen dari kinerja BAPPEDA sebagai penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan.

3.1.4 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilaksanakan

Meskipun capaian kinerja BAPPEDA selalu melebihi dari target yang ditetapkan yang menunjukkan keberhasilan kinerja, namun hal ini tidak terlepas dari

permasalahan dalam pencapaian kinerja tersebut. Salah satunya yaitu belum sinkron atau konsistennya antara program Perangkat Daerah yang direncanakan dan program yang dianggarkan tetap harus menjadi fokus capaian kinerja yang harus dapat diselesaikan. Hal ini dikarenakan dinamika pembangunan yang dihadapi saat ini dengan apa yang ingin dicapai di masa datang akan terus berubah. Adapun faktor pendukung dan kendala yang dihadapi pada saat pencapaian kinerja BAPPEDA serta solusi yang diusahakan untuk mengatasi kendala tersebut diantaranya yaitu:

Tabel 3.5
Faktor Keberhasilan, Kendala dan Solusi Setiap Indikator Kinerja BAPPEDA

Indikator Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan	Kendala dan Permasalahan	Solusi yang telah dilakukan
Persentase kesesuaian program pada dokumen perencanaan terhadap dokumen penganggaran	<ul style="list-style-type: none"> Konsistensi penggunaan program PD dengan tujuan dan sasaran perencanaan pembangunan Asistensi dan pengendalian bidang perencana dalam hal pengusulan program dan kegiatan oleh PD 	Adanya dinamika perubahan Kebijakan/Peraturan dari Pusat maupun Provinsi pada tahun berjalan	Penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Perencanaan Daerah (SIPD)
Persentase ketepatan waktu dalam penyusunan dokumen perencanaan	<ul style="list-style-type: none"> Adanya <i>timeline</i> penyusunan dokumen perencanaan yang jelas Adanya komitmen pimpinan dan jajaran dalam menyelesaikan dokumen tepat waktu 	Mensinergikan antara waktu penyusunan dokumen dan waktu kegiatan-kegiatan rutin serta tugas tambahan dalam satu kurun waktu anggaran	Mengintegrasikan Sistem informasi Manajemen (SIM) untuk mengefisiensikan pekerjaan yang bersamaan dilakukan

Indikator Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan	Kendala dan Permasalahan	Solusi yang telah dilakukan
Persentase usulan Musrenbang Tingkat Kecamatan dalam RKPD	<ul style="list-style-type: none"> Pemahaman tentang prioritas, kewenangan dan mekanisme sistem perencanaan pembangunan Verifikasi bidang perencanaan dalam mengawal usulan 	Kemampuan dan kapasitas SDM Aparatur Kabupaten dan Desa	Penggunaan aplikasi SIPD dalam saat penginputan usulan.
Nilai Akuntabilitas Kinerja BAPPEDA	Pengelolaan Sumber Daya Aparatur baik Manusia, Alat, Penganggaran dan Konsep	Kapasitas dan kemampuan sumber daya yang terbatas dan tidak merata	Menerapkan sistem pengelolaan sumber daya berbasis kinerja dan peningkatan kemampuan serta pelaksanaan rotasi
Persentase aset dalam kondisi baik	Tertib dalam penggunaan dan pemeliharaan aset kantor	Sistem peremajaan aset belum berjalan secara sistematis berbasis peringatan dini	Pengelolaan dan identifikasi aset secara berkala termasuk sistem penghapusan dan persiapan kebutuhan aset baru

Capaian indikator kinerja BAPPEDA tahun 2021 yang menunjukkan hasil signifikan adalah indikator persentase usulan Musrenbang Tingkat Kecamatan dalam RKPD dengan capaian sebesar 98,58% dari target 94,72% atau sebesar 104,07%. Hal ini menunjukkan bahwa usulan DSP Kecamatan sebagian besar telah diakomodir dalam RKPD. Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan meningkat. Hal ini juga didukung oleh adanya Sistem Informasi Perencanaan Daerah (SIPD) yang mengakomodir usulan dari masyarakat.

Jika dilihat dari permasalahan atau faktor penghambat dalam pencapaian indikator kinerja maka langkah penyelesaian permasalahan atau solusi yang telah/akan dilakukan pada tahun 2021 adalah pengembangan Sistem Informasi

Pembangunan Daerah (SIPD), yang diharapkan akan menghilangkan inkonsistensi perencanaan dan penganggaran. Langkah lainnya yang diperlukan adalah penambahan jumlah personil sesuai dengan kompetensi, pelibatan tenaga ahli sebagai tenaga pendukung perencanaan, serta pengadaan tenaga kontrak kegiatan (outsourcing). Untuk peningkatan kualitas SDM yang sudah ada dilakukan melalui Diklat Stuktural maupun Diklat Fungsional serta pengiriman tugas belajar ke Perguruan Tinggi.

3.1.5 Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

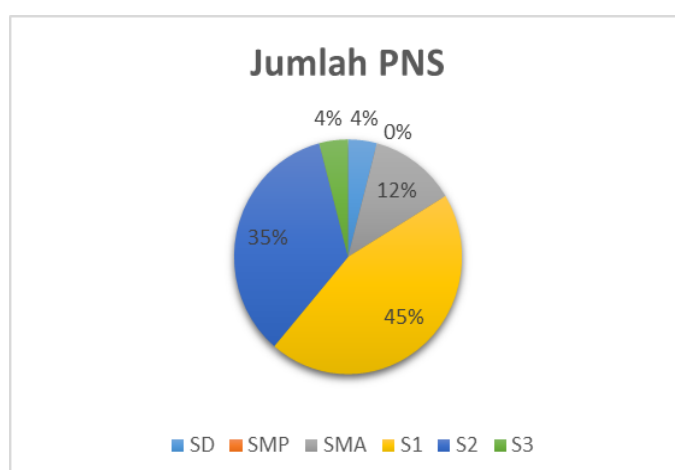
Sumber daya yang ada di BAPPEDA Kabupaten Bandung terdiri dari penyediaan sumber daya manusia berdasarkan tingkat pendidikan, jenis pendidikan yang diikuti baik pendidikan formal maupun non formal, dan penyediaan sarana prasarana yang mendukung penyelenggaraan kegiatan perencanaan seperti gedung beserta ruang rapat yang memadai, fasilitas komputer beserta jaringan internet, meja kursi, peralatan kantor dan lain-lain.

Berikut gambaran tentang sumber daya manusia yang tersedia pada BAPPEDA Kabupaten Bandung pada Tahun 2020:

Tabel 3.6
Jumlah Pegawai BAPPEDA Kabupaten Bandung Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2021

No	Pendidikan	Jumlah PNS	%
1	SD	2	4,08
2	SMP	0	0
3	SMA	6	12,24
4	S1	22	44,89
5	S2	17	34,69
6	S3	2	4,08
Jumlah		49	100

Sumber: Kepegawaian Bappeda Tahun 2021



Tabel 3.6 menunjukkan, Pegawai BAPPEDA Kabupaten Bandung berdasarkan tingkat pendidikan terdiri atas: SD sebesar 4,08%, SMP sebesar 0%, SMA sebesar 12,24%, S1 sebesar 44,89%, S2 sebesar 34,69%

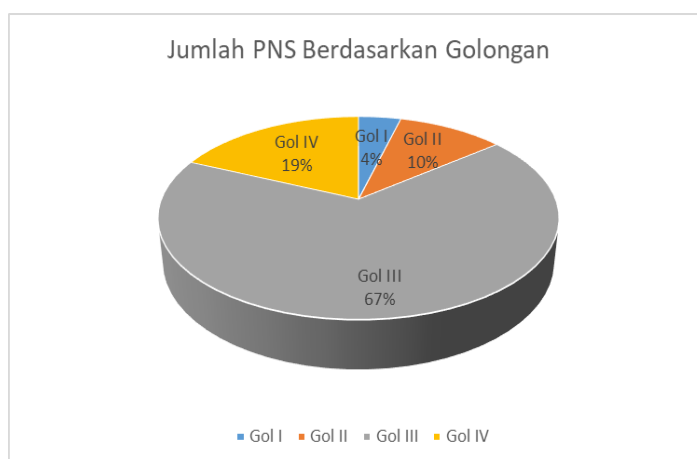
dan S3 sebesar 4,08%. Namun demikian, peningkatan kapasitas sumber daya manusia di BAPPEDA Kabupaten Bandung terkait dengan perencanaan dan evaluasi perlu ditingkatkan melalui pelatihan maupun diklat.

Jumlah pegawai BAPPEDA Kabupaten Bandung berdasarkan pangkat/golongan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.7
Jumlah Pegawai BAPPEDA Kabupaten Bandung
Berdasarkan Tingkat Golongan
Tahun 2020

No	Golongan	Jumlah PNS	%
1	Gol I	2	4
2	Gol II	5	10,2
3	Gol III	33	67,34
4	Gol IV	9	18,36
	Jumlah	49	100

Sumber: Kepegawaian Bappeda Tahun 2021



Berdasarkan Tabel 3.7 diatas maka pegawai BAPPEDA Kabupaten Bandung berdasarkan golongan terdiri atas Golongan I sebanyak 4%, Golongan II sebanyak 10,2%, Golongan III sebanyak 67,34% dan Golongan IV sebanyak 18,36%, melihat komposisi tersebut, pegawai BAPPEDA

Kabupaten Bandung didominasi oleh golongan III.

Jumlah pegawai BAPPEDA Kabupaten Bandung berdasarkan jabatan struktural/fungsional dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.8
Jumlah Pegawai BAPPEDA Kabupaten Bandung
Berdasarkan Jabatan Struktural/Fungsional
Tahun 2020

No	Uraian	Jumlah PNS	%
1	Eselon II	1	2,04
2	Eselon III	6	12,24
3	Eselon IV	14	28,57
4	JFT	7	14,28
5	JFU	21	42,85
	Jumlah	49	100

Sumber: Kepegawaian Bappeda tahun 2021

Berdasarkan Tabel 3.8 diatas maka pegawai BAPPEDA Kabupaten Bandung berdasarkan jabatan struktural/fungsional terdiri atas eselon II sebanyak 2,04%, eselon III sebanyak 12,24%, eselon IV sebanyak 28,57%, jabatan fungsional umum sebanyak 42,85% dan jabatan fungsional tertentu sebanyak 14,28%.

3.1.6 Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Berikut sasaran strategis, indikator kinerja, dan program/kegiatan BAPPEDA Kabupaten Bandung Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.9
Matrik Sasaran Strategis, Indikator Kinerja, dan Program/Kegiatan
Bappeda Kabupaten Bandung Tahun 2021

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Kinerja				
					Target		Realisasi		%
Meningkatnya kapasitas dan kapabilitas Internal BAPPEDA	Meningkatnya efektifitas tata kelola Perangkat Daerah BAPPEDA	Nilai Akuntabilitas Kinerja BAPPEDA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Operasional Administrasi Perkantoran	100	%			
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	- Persentase ketersediaan dokumen sesuai dengan pedoman yang berlaku - Persentase pemenuhan proses perencanaan - Persentase ketercapaian kinerja hasil perencanaan	100	%			100%
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renstra dan Renja yang diselesaikan tepat waktu	2	Dok	2	Dok	100%
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD	1	Dok	1	Dok	100%
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	Dok	1	Dok	100%
			Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD	1	Dok	1	Dok	100%
			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	Dok	1	Dok	100%

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Kinerja				
					Target		Realisasi		%
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen LKIP PD yang diselesaikan secara tepat waktu	1	Dok	1	Dok	100%
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah dokumen laporan tahunan yang diselesaikan secara tepat waktu - Jumlah dokumen laporan triwulanan yang diselesaikan secara tepat waktu - Jumlah dokumen evaluasi renstra dan renja yang diselesaikan secara tepat waktu 	3	Dok	1	Dok	100%
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<ul style="list-style-type: none"> - Persentase ketersediaan dokumen anggaran/keuangan yang diselesaikan tepat waktu - Persentase laporan pertanggungjawaban keuangan sesuai ketentuan - Persentase ketersediaan dokumen kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu 	100	%			100%
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pembayaran Gaji ASN	12	Bulan	12	Bulan	100%

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Kinerja				
					Target		Realisasi		%
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	- Jumlah laporan realisasi anggaran yang diselesaikan secara tepat waktu - Jumlah dokumen CALK	1	Dok	1	Dok	100%
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan rekonsiliasi keuangan bulanan/triwulanan/semesteran yang diselesaikan secara tepat waktu	1	Dok	1	Dok	100%
			Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah laporan prognosis realisasi anggaran yang diselesaikan secara tepat waktu	1	Dok	1	Dok	100%
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tercapainya Persentase rata-rata capaian SKP ASN diatas >=80%	100	%			100%
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang dibutuhkan	79	Stel	79	Stel	100%
			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah pegawai yang mengikuti bimbingan teknis peraturan perundang-undangan	40	Orang	40	Orang	100%

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Kinerja				
					Target		Realisasi		%
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<ul style="list-style-type: none"> - Tercapainya Persentase ketersediaan dokumen anggaran/keuangan yang diselesaikan tepat waktu - Persentase laporan pertanggungjawaban keuangan sesuai ketentuan - Persentase ketersediaan dokumen kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu - Tercapainya Persentase ketersediaan operasional perkantoran - Persentase pemenuhan gedung kantor yang layak pakai 	100	%			104,69%
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah penerimaan surat masuk dan pembuatan surat keluar	4000	Buah	4563	Buah	114%
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan pembayaran jasa layanan komunikasi, air dan listrik	12	Bulan	12	Bulan	100%
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan pembayaran jasa pelayanan umum (meliputi penyediaan jasa kebersihan, Tenaga Keamanan dan Tenaga Harian Lepas (THL)	12	Bulan	12	Bulan	100%

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Kinerja				
					Target		Realisasi		%
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	-Tercapainya Persentase ketersediaan operasional perkantoran -Persentase pemenuhan gedung kantor yang layak pakai	100	%			96,62%
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah satuan bahan logistik kantor yang dibeli	3	Jenis	3	Jenis	100%
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah satuan barang yang dicetak dan digandakan	15	Jenis	5	Jenis	33,33%
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan yang dibeli	21	Jenis	21	Jenis	100%
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang dibeli	63	Jenis	63	Jenis	100%
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah jenis peralatan rumah tangga yang dibeli	5	Jenis	5	Jenis	100%
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan yang dibeli	3	Jenis	3	Jenis	100%
			Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah orang yang mendapatkan makanan dan minuman	250	Box	215	Box	86,00%

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Kinerja				
					Target		Realisasi		%
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah orang yang melaksanakan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	250	Hok	234	Hok	93,60%
		Persentase aset dalam kondisi baik	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan dokumen barang milik daerah	100	%			100%
			Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah pengadaan mobil jabatan	1	Unit	-	-	-
			Pengadaan Mebel	Jumlah pengadaan mebel	3	Jenis	3	Jenis	100%
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan aset kantor yang layak pakai	100	%			100%
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	1	Paket	1	Paket	100%
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan yang dipelihara	34	Unit	34	Unit	100%
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor	1	Paket	1	Paket	100%

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Kinerja				
					Target		Realisasi		%
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Meningkatnya kualitas produk perencanaan pembangunan daerah	Persentase ketepatan waktu dalam penyusunan dokumen perencanaan	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	1. Persentase kesesuaian program pada dokumen perencanaan dengan dokumen penganggaran	97	%			
				2. Persentase dokumen perencanaan yang tepat waktu	100	%			
				3. Persentase usulan Musrenbang Tingkat Kecamatan dalam RKPD	96,5	%			
	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan daerah	100	%			100%
			Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen Ranwal RKPD dan Dokumen Rancangan Awal RPJMD)	2	Dok	2	Dok	100%
			Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	1. Jumlah Dokumen Usulan DAK 2. Jumlah Dokumen Usulan Bantuan Keuangan Gubernur 3. Jumlah Dokumen Perda SPPD	3	Dok	3	Dok	100%
			Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah pelaksanaan Konsultasi Publik RPJMD dan RKPD	1	Dok	1	Dok	100%

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Kinerja				
					Target		Realisasi		%
			Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Jumlah pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	1	Dok	1	Dok	100%
			Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	1. Jumlah penyelenggaraan Musrenbang RKPD 2. Jumlah penyelenggaraan Musrenbang RPJMD	2	Dok	2	Dok	100%
			Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (Dokumen RKPD, Dokumen RKPD Perubahan, Dokumen RPJMD)	3	Dok	3	Dok	100%
			Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase ketersediaan dokumen data dan informasi perencanaan pembangunan	100	%			100%
			Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	- Jumlah Dokumen Analisa Pembangunan - Jumlah Dokumen E-Database SIPD Kabupaten Bandung	2	Dok	2	Dok	100%
			Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	- Jumlah Dokumen Prosiding Satu Data Kabupaten Bandung (SDKB) - Jumlah Updating Aplikasi Perencanaan	1	Dok	1	Dok	100%

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Kinerja				
					Target		Realisasi		%
			Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	- Jumlah Dokumen Profil Pelaksanaan kegiatan dan sub kegiatan kewilayahan - Jumlah Video dan Buku Saku Profil Data Perencanaan Pembangunan - Jumlah dokumen Prosiding Pendampingan Aplikasi SIPD	2	Dok	2	Dok	100%
			Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Perangkat Daerah yang memiliki Realisasi Kinerja Baik dan Sangat Baik	95	%			100%
			Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Monitoring Program dan Kegiatan Perangkat Daerah	1	Dok	1	Dok	100%
			Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	1. Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Laporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah 2. Jumlah dokumen pelaporan capaian pembangunan	2	Dok	2	Dok	100%

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Kinerja					
					Target		Realisasi		%	
		Persentase kesesuaian program pada dokumen perencanaan dengan dokumen anggaran	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	1. Persentase kesesuaian program pada dokumen perencanaan dengan dokumen anggaran 2. Persentase ketercapaian indikator kinerja program	97	%				
			Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	1. Persentase kesesuaian program yang direncanakan terhadap program yang dianggarkan lingkup bidang pemerintahan dan pembangunan manusia 2. Persentase ketercapaian indikator kinerja program lingkup bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	99	%				100%
			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah dokumen koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Pemerintahan	1	Dok	1	Dok		100%

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Kinerja				
					Target		Realisasi		%
			Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah dokumen pelaporan hasil asistensi Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Pemerintahan	1	Dok	1	Dok	100%
			Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah dokumen monev Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Pemerintahan	1	Dok	1	Dok	100%
			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah dokumen koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Pembangunan Manusia	1	Dok	1	Dok	100%
			Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah dokumen pelaporan hasil asistensi Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Pembangunan Manusia	1	Dok	1	Dok	100%

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Kinerja				
					Target		Realisasi		%
			Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah dokumen monev Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Pembangunan Manusia	1	Dok	1	Dok	100%
			Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	1. Persentase kesesuaian program yang direncanakan terhadap program yang dianggarkan lingkup bidang perekonomian dan SDA	94	%			100%
				2. Persentase ketercapaian indikator kinerja program lingkup bidang perekonomian dan SDA	75	%			
			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah dokumen koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Perekonomian	1	Dok	1	Dok	100%

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Kinerja				
					Target		Realisasi		%
			Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah dokumen pelaporan hasil asistensi Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Perekonomian	1	Dok	1	Dok	100%
			Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah dokumen pelaporan hasil sinergitas perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) bidang perekonomian	1	Dok	1	Dok	100%
			Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	1. Persentase kesesuaian program yang direncanakan terhadap program yang dianggarkan lingkup bidang infrastruktur dan kewilayahan 2. Persentase ketercapaian indikator kinerja program lingkup bidang infrastruktur dan kewilayahan	99	%			100%
			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah dokumen koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Infrastruktur	1	Dok	1	Dok	100%

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Kinerja				
					Target		Realisasi		%
			Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah dokumen pelaporan hasil asistensi Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Infrastruktur	1	Dok	1	Dok	100%
			Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah dokumen monev Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Infrastruktur	1	Dok	1	Dok	100%
			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah dokumen koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Kewilayahan	1	Dok	1	Dok	100%
			Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah dokumen pelaporan hasil asistensi Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Kewilayahan	1	Dok	1	Dok	100%
			Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah dokumen monev Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Kewilayahan	1	Dok	1	Dok	100%

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Kinerja				
					Target		Realisasi		%
			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase pemanfaatan data dan informasi hasil kajian/penelitian untuk penunjang perencanaan	96	%			
			Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Jumlah dokumen hasil penelitian dan pengembangan bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan	96	%			100%
			Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah dokumen pengelolaan data kelitbangan dan peraturan	1	Dok	1	Dok	100%
			Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Jumlah Dokumen hasil Penelitian dan Pengembangan bidang ekonomi dan pembangunan	96	%			100%
			Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Jumlah dokumen hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	1	Dok	1	Dok	100%
			Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika	Jumlah dokumen hasil Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika	1	Dok	1	Dok	100%

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Kinerja					
					Target		Realisasi		%	
			Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Jumlah dokumen pengembangan inovasi dan teknologi	96	%			100%	
			Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah dokumen inovasi daerah	1	Dok	1	Dok	100%	
			Jumlah							100,05%

Dari matrik tersebut diatas menunjukkan bahwa semua program/kegiatan dan subkegiatan yang dilaksanakan, menunjang keberhasilan pencapaian target kinerja di BAPPEDA Kabupaten Bandung Tahun 2021.

3.2 Realisasi anggaran Bappeda Kabupaten Bandung Tahun 2021

Tabel 3.10
Matrik Realisasi Anggaran Program/Kegiatan sesuai Sasaran Strategis
Bappeda Kabupaten Bandung Tahun 2021

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target	Kinerja	
						Realisasi	%
Meningkatnya kapasitas dan kapabilitas Internal BAPPEDA	Meningkatnya efektifitas tata kelola Perangkat Daerah BAPPEDA	Nilai Akuntabilitas Kinerja BAPPEDA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Operasional Administrasi Perkantoran	16.591.590.290	14.903.166.989	89,82%

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target	Kinerja	
						Realisasi	%
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	- Persentase ketersediaan dokumen sesuai dengan pedoman yang berlaku - Persentase pemenuhan proses perencanaan - Persentase ketercapaian kinerja hasil perencanaan	426.245.204	401.580.602	94%
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renstra dan Renja yang diselesaikan tepat waktu	246.000.000	240.285.319	98%
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD	5.000.000	3.127.500	63%
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD	5.000.000	3.678.400	74%
			Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD	5.000.000	-	0%
			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan DPA-SKPD	5.000.000	1.951.091	39%
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen LKIP PD yang diselesaikan secara tepat waktu	67.149.904	64.815.542	97%

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target	Kinerja	
						Realisasi	%
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah dokumen laporan tahunan yang diselesaikan secara tepat waktu - Jumlah dokumen laporan triwulanan yang diselesaikan secara tepat waktu - Jumlah dokumen evaluasi renstra dan renja yang diselesaikan secara tepat waktu 	93.095.300	87.722.750	94%
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<ul style="list-style-type: none"> - Persentase ketersediaan dokumen anggaran/keuangan yang diselesaikan tepat waktu - Persentase laporan pertanggungjawaban keuangan sesuai ketentuan - Persentase ketersediaan dokumen kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu 	12.583.980.363	11.191.644.034	89%
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pembayaran Gaji ASN	12.454.780.363	11.082.855.928	89%

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target	Kinerja	
						Realisasi	%
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	- Jumlah laporan realisasi anggaran yang diselesaikan secara tepat waktu - Jumlah dokumen CALK	48.000.000	32.989.980	69%
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan rekonsiliasi keuangan bulanan/triwulanan/semesteran yang diselesaikan secara tepat waktu	31.200.000	27.771.200	89%
			Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah laporan prognosis realisasi anggaran yang diselesaikan secara tepat waktu	50.000.000	48.026.926	96%
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tercapainya Persentase rata-rata capaian SKP ASN diatas $\geq 80\%$	184.852.097	170.266.300	92%
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang dibutuhkan	110.750.000	101.675.000	92%
			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah pegawai yang mengikuti bimbingan teknis peraturan perundang-undangan	74.102.097	68.591.300	93%

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target	Kinerja	
						Realisasi	%
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<ul style="list-style-type: none"> - Tercapainya Persentase ketersediaan dokumen anggaran/keuangan yang diselesaikan tepat waktu - Persentase laporan pertanggungjawaban keuangan sesuai ketentuan - Persentase ketersediaan dokumen kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu - Tercapainya Persentase ketersediaan operasional perkantoran - Persentase pemenuhan gedung kantor yang layak pakai 	1.212.767.668	1.132.209.084	93,36%
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah penerimaan surat masuk dan pembuatan surat keluar	27.000.000	16.059.300	59%
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan pembayaran jasa layanan komunikasi, air dan listrik	110.247.668	79.335.299	72%

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target	Kinerja	
						Realisasi	%
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan pembayaran jasa pelayanan umum (meliputi penyediaan jasa kebersihan, Tenaga Keamanan dan Tenaga Harian Lepas (THL))	1.075.520.000	1.036.814.485	96%
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	-Tercapainya Persentase ketersediaan operasional perkantoran -Persentase pemenuhan gedung kantor yang layak pakai	1.242.644.958	1.134.524.227	91,30%
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah satuan bahan logistik kantor yang dibeli	20.000.000	19.973.183	100%
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah satuan barang yang dicetak dan digandakan	37.057.458	11.185.977	30%
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan yang dibeli	38.000.000	38.000.000	100%
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang dibeli	935.000.000	899.795.700	96%

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target	Kinerja	
						Realisasi	%
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah jenis peralatan rumah tangga yang dibeli	60.000.000	59.807.000	100%
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan yang dibeli	10.945.000	9.197.700	84%
			Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah orang yang mendapatkan makanan dan minuman	51.142.500	12.450.000	24,34%
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah orang yang melaksanakan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	90.500.000	84.114.667	92,94%
		Persentase aset dalam kondisi baik	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan dokumen barang milik daerah	60.000.000	58.350.000	97%
			Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah pengadaan mobil jabatan	-	-	#DIV/0!
			Pengadaan Mebel	Jumlah pengadaan mebel	60.000.000	58.350.000	97%
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan aset kantor yang layak pakai	881.100.000	814.592.742	92%
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	389.750.000	386.450.000	99%

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target	Kinerja	
						Realisasi	%
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan yang dipelihara	201.350.000	151.917.492	75%
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor	290.000.000	276.225.250	95%
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Meningkatnya kualitas produk perencanaan pembangunan daerah	Persentase ketepatan waktu dalam penyusunan dokumen perencanaan	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	1. Persentase kesesuaian program pada dokumen perencanaan dengan dokumen penganggaran 2. Persentase dokumen perencanaan yang tepat waktu 3. Persentase usulan Musrenbang Tingkat Kecamatan dalam RKPD	2.977.839.623	2.669.929.754	90%
	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan daerah	1.775.525.630	1.508.339.702	85%

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target	Kinerja	
						Realisasi	%
			Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen Ranwal RKPD dan Dokumen Rancangan Awal RPJMD)	177.792.750	157.600.372	89%
			Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	1. Jumlah Dokumen Usulan DAK 2. Jumlah Dokumen Usulan Bantuan Keuangan Gubernur 3. Jumlah Dokumen Perda SPPD	73.411.200	69.892.600	95%
			Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah pelaksanaan Konsultasi Publik RPJMD dan RKPD	119.496.000	114.099.780	95%
			Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Jumlah pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	60.650.050	47.500.000	78%
			Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	1. Jumlah penyelenggaraan Musrenbang RKPD 2. Jumlah penyelenggaraan Musrenbang RPJMD	478.329.000	430.950.374	90%

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target	Kinerja	
						Realisasi	%
			Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (Dokumen RKPD, Dokumen RKPD Perubahan, Dokumen RPJMD)	865.846.630	688.296.576	79%
			Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase ketersediaan dokumen data dan informasi perencanaan pembangunan	793.359.493	769.697.956	97%
			Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	- Jumlah Dokumen Analisa Pembangunan - Jumlah Dokumen E-Database SIPD Kabupaten Bandung	225.497.000	219.383.200	97%
			Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	- Jumlah Dokumen Prosiding Satu Data Kabupaten Bandung (SDKB) - Jumlah Updating Aplikasi Perencanaan	328.757.300	322.760.000	98%

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target	Kinerja	
						Realisasi	%
			Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	- Jumlah Dokumen Profil Pelaksanaan kegiatan dan sub kegiatan kewilayahan - Jumlah Video dan Buku Saku Profil Data Perencanaan Pembangunan - Jumlah dokumen Prosiding Pendampingan Aplikasi SIPD	239.105.193	227.554.756	95%
			Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Perangkat Daerah yang memiliki Realisasi Kinerja Baik dan Sangat Baik	408.954.500	391.892.096	96%
			Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Monitoring Program dan Kegiatan Perangkat Daerah	242.436.000	230.681.971	95%
			Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	1. Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Laporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah 2. Jumlah dokumen pelaporan capaian pembangunan	166.518.500	161.210.125	97%

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target	Kinerja	
						Realisasi	%
		Persentase kesesuaian program pada dokumen perencanaan dengan dokumen penganggaran	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	1. Persentase kesesuaian program pada dokumen perencanaan dengan dokumen penganggaran 2. Persentase ketercapaian indikator kinerja program	2.763.558.000	2.517.868.248	91%
			Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	1. Persentase kesesuaian program yang direncanakan terhadap program yang dianggarkan lingkup bidang pemerintahan dan pembangunan manusia 2. Persentase ketercapaian indikator kinerja program lingkup bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	811.500.000	604.335.936	74%
			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah dokumen koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Pemerintahan	109.326.000	47.776.562	44%

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target	Kinerja	
						Realisasi	%
			Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah dokumen pelaporan hasil asistensi Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Pemerintahan	108.500.000	103.890.165	96%
			Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah dokumen monev Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Pemerintahan	77.500.000	51.830.981	67%
			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah dokumen koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Pembangunan Manusia	261.674.000	212.470.981	81%
			Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah dokumen pelaporan hasil asistensi Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Pembangunan Manusia	132.000.000	86.840.991	66%

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target	Kinerja	
						Realisasi	%
			Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah dokumen monev Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Pembangunan Manusia	122.500.000	101.526.256	83%
			Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	1. Persentase kesesuaian program yang direncanakan terhadap program yang dianggarkan lingkup bidang perekonomian dan SDA 2. Persentase ketercapaian indikator kinerja program lingkup bidang perekonomian dan SDA	910.000.000	880.925.912	97%
			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah dokumen koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Perekonomian	218.000.000	205.288.916	94%

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target	Kinerja	
						Realisasi	%
			Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah dokumen pelaporan hasil asistensi Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Perekonomian	310.000.000	298.081.695	96%
			Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah dokumen pelaporan hasil sinergitas perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) bidang perekonomian	382.000.000	377.555.301	99%
			Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Wilayah	1. Persentase kesesuaian program yang direncanakan terhadap program yang dianggarkan lingkup bidang infrastruktur dan kewilayahan 2. Persentase ketercapaian indikator kinerja program lingkup bidang infrastruktur dan kewilayahan	1.042.058.000	1.032.606.400	99%

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target	Kinerja	
						Realisasi	%
			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah dokumen koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Infrastruktur	389.100.000	380.673.800	98%
			Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah dokumen pelaporan hasil asistensi Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Infrastruktur	94.858.000	94.851.400	100%
			Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah dokumen monev Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Infrastruktur	151.430.000	150.821.200	100%
			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah dokumen koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Kewilayahan	172.100.000	172.100.000	100%

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target	Kinerja	
						Realisasi	%
			Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah dokumen pelaporan hasil asistensi Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Kewilayahan	119.000.000	118.990.000	100%
			Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah dokumen monev Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Kewilayahan	115.570.000	115.170.000	100%
			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase pemanfaatan data dan informasi hasil kajian/penelitian untuk penunjang perencanaan	981.541.000	943.551.206	96%
			Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Jumlah dokumen hasil penelitian dan pengembangan bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan	303.100.000	297.845.823	98%

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target	Kinerja	
						Realisasi	%
			Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah dokumen pengelolaan data kelitbangan dan peraturan	303.100.000	297.845.823	98%
			Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Jumlah Dokumen hasil Penelitian dan Pengembangan bidang ekonomi dan pembangunan	365.441.000	360.504.820	99%
			Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Jumlah dokumen hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	281.305.500	279.705.320	99%
			Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika	Jumlah dokumen hasil Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika	84.135.500	80.799.500	96%
			Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Jumlah dokumen pengembangan inovasi dan teknologi	313.000.000	285.200.563	91%
			Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah dokumen inovasi daerah	313.000.000	285.200.563	91%
			Jumlah		23.314.528.913	21.034.516.197	90,22%

Pada Tahun Anggaran 2021, BAPPEDA Kabupaten Bandung dialokasikan anggaran Belanja sebesar Rp. 23.314.528.913,16 yang terbagi ke dalam Belanja Operasional sebesar Rp. 21.930.546.733,16 yang dijabarkan ke dalam 4 Program, 16 Kegiatan 58 subkegiatan serta Belanja Modal sebesar Rp. 1.352.072.880 yang dijabarkan ke dalam belanja modal peralatan mesin, gedung dan bangunan serta modal aset tetap lainnya. sebagai berikut:

1. Belanja Operasional dengan target Tahun 2021 sebesar Rp23.314.528.913,16 dengan realisasi sebesar Rp. 21.930.546.733,16
2. Belanja Modal dengan target Tahun 2021 sebesar Rp. 1.352.072.880 dengan realisasi sebesar Rp. 1.383.982.180.

Penyelenggaraan kegiatan di BAPPEDA Kabupaten Bandung merupakan tahapan dari Rencana Strategis BAPPEDA Tahun 2016-2021. Keberhasilan yang dicapai adalah berkat kerjasama dan partisipasi semua pihak. Namun peningkatan kinerja tetap harus dilakukan untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan kualitas pembangunan.

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) BAPPEDA Kabupaten Bandung Tahun 2021 ini merupakan perwujudan konkrit tingkat pencapaian kinerja (*performing goverment*) BAPPEDA Kabupaten Bandung. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 5 (lima) indikator sasaran, disimpulkan bahwa:

Pertama, sasaran strategis BAPPEDA Kabupaten Bandung yaitu meningkatnya kualitas produk perencanaan pembangunan daerah, dengan capaian indikator kinerja adalah sebagai berikut : (1). Persentase kesesuaian program pada dokumen perencanaan terhadap dokumen penganggaran sebesar 100%; (2). Persentase ketepatan waktu dalam penyusunan dokumen perencanaan sebesar 100%.

Kedua, sasaran strategis meningkatnya peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan dengan capaian indikator kinerja: (1). Persentase usulan Musrenbang tingkat kecamatan dalam RKPD sebesar 99,97%.

Ketiga, sasaran strategis meningkatnya efektifitas tata kelola perangkat daerah BAPPEDA dengan capaian indikator kinerja: (1). Nilai akuntabilitas kinerja BAPPEDA sebesar 83 (A); (2) Persentase aset dalam kondisi baik sebesar 96,30%.

Berdasarkan hasil evaluasi dan analisis terhadap 3 (tiga) sasaran strategis dan 5 (lima) indikator, pencapaian sasaran kinerja BAPPEDA Kabupaten Bandung menunjukkan hasil yang memuaskan dengan nilai rata-rata sebesar 100,39% dan realisasi anggaran sebesar 90,22%.

Dari pengukuran kinerja yang dilakukan, kinerja pelaksanaan kegiatan di BAPPEDA Kabupaten Bandung secara umum sudah mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Namun demikian, capaian kinerja tersebut tidak berarti bahwa pelaksanaan kegiatan tersebut sudah sempurna dilakukan. Peningkatan kinerja di BAPPEDA Kabupaten Bandung tetap harus dilakukan untuk meningkatkan kualitas perencanaan.

4.2 Langkah-langkah dimasa mendatang yang akan dilakukan Bappeda

Langkah-langkah ke depan yang akan dilakukan BAPPEDA Kabupaten Bandung dalam upaya mendorong peningkatan kinerja dan menghadapi tantangan kedepan antara lain:

1. Adanya komitmen pimpinan dan jajaran dalam menyelesaikan dokumen tepat waktu dengan cara membangun Sistem Informasi Manajemen (SIM) untuk mengefisiensikan

pekerjaan yang bersamaan dilakukan;

2. Memaksimalkan penggunaan aplikasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD);
3. Menerapkan manajemen aset secara baik dalam hal penghapusan maupun rencana kebutuhan aset yang baru.